

**PERAN PEMERINTAH DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI SEKTOR PERIKANAN**
(Studi pada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana (S1)
Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**RIZKI ANANDA
0910310299**



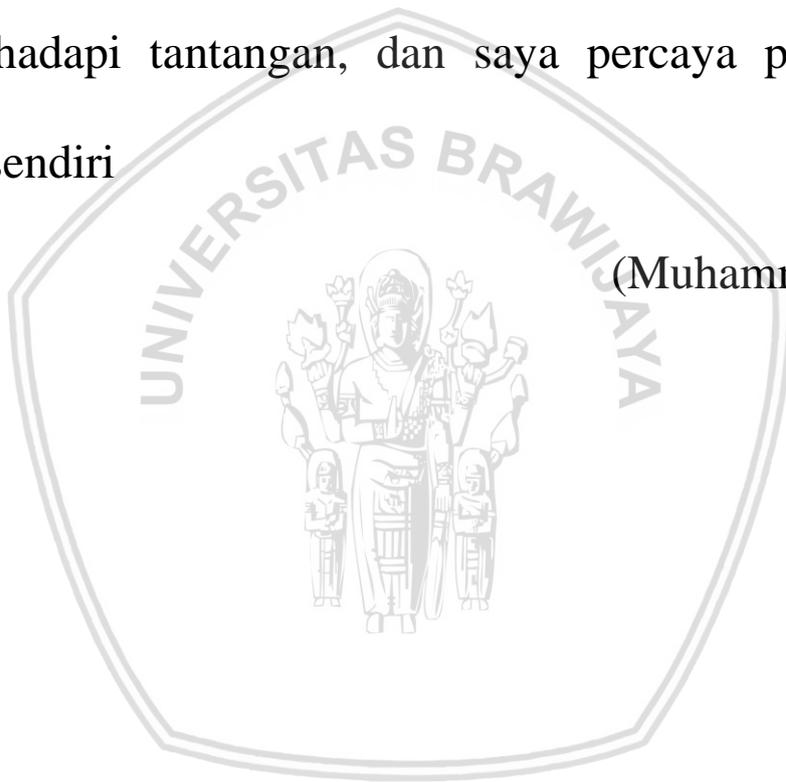
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**



MOTTO

Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri

(Muhammad Ali)





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Univesitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 02 Juni 2016

Jam : 09.00 - 10.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Rizki Ananda

Judul : Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan

Berkelanjutan di Sektor Perikanan

Dan dinyatakan lulus.

Majelis Penguji

Ketua

Anggota

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota

Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP
NIP. 201107851214 1 001



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perikanan (Studi pada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo)

Disusun oleh : Rizki Ananda

NIM : 0910310299

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

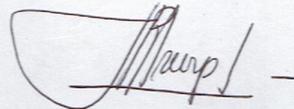
Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, 2 Mei 2016

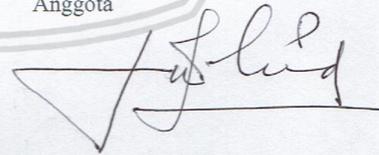
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si
NIP. 19530807 197903 2 001



Drs. Abdul Wachid, M. AP.
NIP. 19561209 198703 1 008

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 9 Mei 2016



RINGKASAN

Rizki Ananda, 2016, **Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perikanan (Studi pada Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo)**, Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP

Penelitian ini dilakukan karena Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Kota Probolinggo menjadi salah satu pelabuhan perikanan pantai terbesar di pesisir utara Pulau Jawa bagian timur dengan sumber daya perikanan yang sangat potensial. Pelabuhan ini terus berusaha untuk berkembang tidak hanya sebagai lokasi pendaratan ikan, melainkan menjadi pusat investasi di bidang perikanan serta wisata edukasi, hal ini didasarkan pada kondisi alam dan letak geografis yang sangat mendukung. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai dan layak digunakan akan mempengaruhi kegiatan produksi perikanan di wilayah laut dan darat dalam bongkar muat hasil tangkapan ikan. Agar kegiatan-kegiatan operasional pelabuhan perikanan dapat berkembang dengan baik, maka dibutuhkan adanya peran serta pemerintah provinsi untuk pengembangan pelabuhan perikanan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan asset pelabuhan dan memperlancar kegiatan perikanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta faktor yang menjadi penghambat peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo. Sumber data diperoleh dari informan yang merupakan pegawai UPT di wilayah Probolinggo, berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi dari berbagai sumber. Analisis data didasarkan pada analisis interaktif oleh Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah berperan memberikan berbagai fasilitas pelabuhan, pengendalian dan pengawasan pelabuhan guna ketertiban berlayar serta terjaganya ekosistem perikanan. Dalam pengembangannya Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan terdapat faktor penghambat salah satunya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang bertugas merawat dan menjaga bangunan tersebut, kurangnya kepedulian pengguna jasa terhadap pelabuhan perikanan. Rekomendasi yang paling utama agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dapat menjalin komunikasi secara efektif dengan instansi yang terkait untuk mengoptimalkan operasional pelabuhan perikanan serta lebih intensif memberikan himbauan tentang aturan pelabuhan perikanan terhadap pengguna jasa pelabuhan perikanan.

Kata Kunci : peran pemerintah, pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan

SUMMARY

Ananda, 2016, **Role of Government in Achieving Sustainable Development of Fisheries Sector(Study on Development of Coastal Fishery Port Mayangan in Probolinggo)**, Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP

This research was conducted as Mayangan Coastal Fishing Port in the town of Probolinggo become one of the largest coastal fishing port on the north coast of eastern Java with fisheries resources potential. This port is constantly striving to develop not just as a fish landing site, but rather a center of investment in the field of fisheries and tourism education, it's based on natural conditions and geographic location are very supportive. Provision of facilities and infrastructure of the fishing port of adequate and fit for use will affect fisheries production activities in the area of land and sea in the loading and unloading of fish catches. In order for the operational activities of fishing ports thrive, we need the participation of the provincial government for the development of fishing ports on an ongoing basis so as to improve the port assets and facilitate the activities of these fisheries. This study aims to describe and analyze as well as factors that constrain the government's role in realizing sustainable development.

This research uses descriptive qualitative approach. The research was done at the Port Fishery Mayangan Beach in Probolinggo. Sources of data obtained from informants merupakan UPT employees in the area of Probolinggo, in the form of interviews, observation, and documentation from various sources. The data analysis was based on an interactive analysis by Miles and Hubberman.

The results of this study concluded that the government has a role providing various port facilities, control and supervision of the port to sail order and in the maintenance of fisheries ecosystems. In its development Mayangan Coastal Fishery Port are inhibiting factors one of which is the lack of human resources in charge of tending and maintaining the building, the lack of concern for service users to the fishing port. The most important recommendation that the Department of Marine and Fisheries, East Java Province through the Technical Implementation Unit Mayangan Coastal Fishing Port can communicate effectively with agencies to optimize operational as well as more intensive fishing ports provide an appeal about the rules of fishing ports fishing ports to service users.

Keywords: the role of government, sustainable development, fisheries sector

KATA PENGANTAR

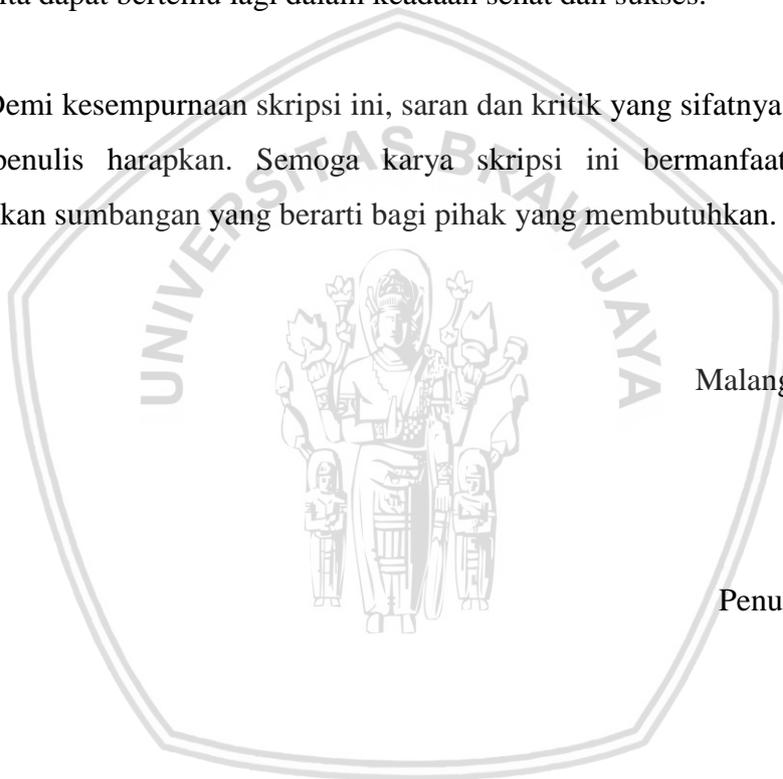
Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perikanan (Studi pada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo).” Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi.

Atas tersusunnya skripsi ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan tulus ikhlas. Pada kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr.Lely Indah Mindarti, M.Si selaku ketua Prodi Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si dan Drs. Abdul Wachid, M.APselakuDosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Adminstrasi terutama dosen jurusan Administrasi Publik atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
6. Kepada Bapak Siwanto seksi sarana prasarana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Bapak Nonot Widjayantodari Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan selaku narasumber obyek penelitian atas waktu dan kemudahan yang diberikan dalam melakukan penelitian dan wawancara.

7. Kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, dan serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi yang besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat angkatan 2009 kelas G, teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi terutama Jurusan Administrasi Publik angkatan 2009 yang selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini serta masih banyak lainnya yang selalu menemani dalam menjalani kuliah di Malang selama ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat dan sukses.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, 2 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
RINGKASAN	iii
<i>SUMMARY</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB I IKAJIAN PUSTAKA	10
A. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	18
C. Peran Pemerintah Daerah	22
D. Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)	30
E. Pelabuhan Perikanan	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Fokus Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Instrumen Penelitian	53
G. Analisis Data	53



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Kota Probolinggo	58
2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo	61
B. Penyajian data	74
1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo.	74
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo	99
C. Pembahasan	109
1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo.	109
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo	115
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan	78
Tabel 2. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.....	83
Tabel 3. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan	89
Tabel 4. Data Armada Kapal Perikanan beserta Alat Tangkap yang digunakan PPP Mayangan- Kota Probolinggo Tahun 2013	94
Tabel 5. Perbandingan Jumlah Armada Kapal Perikanan PPP Mayangan – kota Probolinggo Tahun 2011-2013	95
Tabel 6. Perbandingan Jumlah Alat Tangkap Ikan PPP Mayangan – kota Probolinggo Tahun 2011-2013	95
Tabel 7. Perbandingan Jumlah Hasil Produksi Tangkapan Ikan.....	96
Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	55
Gambar 2. Skema Kerja di UPPPP Mayangan Kota Probolinggo.....	73
Gambar 3. Interview dengan Bpk Nonot Wijayanto selaku kepala Pelabuhan & Syahbandar.....	76
Gambar4. Breakwater barat	79
Gambar 5. Dermaga (<i>sheet pile</i>)	80
Gambar 6. Jalan Pelabuhan	81
Gambar 7. Kolam Pelabuhan Mayangan	82
Gambar 8 Kantor Administrasi pelabuhan.....	84
Gambar 9. SPBU untuk kapal ikan	86
Gambar 10. IPAL PPP Mayangan	87
Gambar 11. Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Mayangan	87
Gambar 12. Musholla.....	90
Gambar13. Gedung pertemuan	91
Gambar 14 Saluran irigasi pelabuhan	101
Gambar15.pos pengawasan pelabuhan	101
Gambar16. Kantor unit kredit rakyat	102
Gambar17 tempat parkir pelabuhan	102
Gambar18 kolam labuh pelabuhan.....	104
Gambar 19. Area penyimpanan jaring	103

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Melaksanakan Survey / Penelitian
2. LAKIP Dinas Kelautann dan Perikanan 2014
3. *Master Plan* Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah daratan Indonesia (1,9 juta km²) tersebar pada sekitar 17.500 lebih pulau yang disatukan oleh laut yang sangat luas (sekitar 5,8 juta km²). Panjang garis pantai yang mengelilingi daratan tersebut adalah sekitar 81.000 km, yang merupakan garis pantai tropis terpanjang atau terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Secara geografis kepulauan dan perairan Indonesia terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia; dan antara benua Asia dan benua Australia, termasuk didalamnya paparan Sunda di bagian barat dan paparan sahur di bagian timur. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (mega biodiversity). Tingginya keanekaragaman hayati tersebut bukan hanya disebabkan oleh letak geografis yang sangat strategis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor seperti variasi iklim musiman, arus atau massa air laut yang dipengaruhi oleh massa dari dua samudera, serta keragaman tipe habitat dan ekosistem yang terdapat didalamnya. Keanekaragaman hayati laut yang luar biasa ini seharusnya dapat membantu Indonesia bukan sekadar keluar dari krisis ekonomi, melainkan dapat menghantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur dan mandiri (mahyudin, 2008)

Salah satu propinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur mempunyai luas perairan 357.707 km². Meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali (Wilayah

Pantai Utara). Memiliki panjang garis pantai 1900 km dan 446 pulau. Sebanyak 23 daerah dari 38 kabupaten / kota atau lebih 60% merupakan wilayah pesisir. Jasa maritim, pulau-pulau kecil, kekayaan tambang dan mineral, perikanan dan budidaya laut serta industri kelautan merupakan aset yang terabaikan. Sementara posisi Geopolitik yang sangat strategis menjadikan Provinsi Maritim Jawa Timur, sebagai sentra kegiatan ekonomi untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). Namun, pembangunan yang selama ini dilaksanakan masih berbasis continental atau daratan (Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, 2009)

Potensi pembangunan yang berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan yang merupakan domain ekonomi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pendayagunaan sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya, baik laut maupun perairan umum, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi laut dan perairan tawar. Untuk memajukan kegiatan industri perikanan dan merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah dengan menyediakan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai. Seperti tercantum dalam Undang Undang Pasal 41 nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Pemerintah berkewajiban untuk membangun pelabuhan perikanan dengan tujuan antara lain untuk menunjang proses motorisasi dan modernisasi unit penangkapan ikan tradisional bertahap dalam rangka memperbaiki usaha perikanan tangkap untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan.

Untuk menunjang peran dan fungsi pelabuhan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan sebagai pusat aktifitas produksi, distribusi dan kegiatan masyarakat nelayan, maka pelabuhan perikanan perlu dilengkapi dengan berbagai

sarana penunjang sebagai sarana pokok. Dalam kaitannya dengan rencana pengembangan suatu pelabuhan perikanan, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang, cermat dan akurat sehingga segala sarana yang dibutuhkan oleh suatu pelabuhan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal (Triatmono, 2002). Adanya pelabuhan disebabkan karena adanya manusia untuk menggunakannya sebagai jembatan penghubung antara darat dan laut. Oleh karena itu, perkembangan pelabuhan tergantung pada kegiatan niaga dan transport, yang biasanya dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik atau pemerintahan, faktor operasional atau administrasi dan faktor pengelolaan (Triyanto, 2005). Pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti suatu kegiatan dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan secara ekologis berarti bahwa pembangunan tersebut dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konsevasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati. Sementara itu pembangunan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004:52).

Salah satu usaha dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memajukan industri perikanan laut adalah membangun pelabuhan-pelabuhan perikanan modern di beberapa lokasi yang mempunyai hasil tangkap yang tinggi. Salah satu yang dipilih untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan adalah di daerah Mayangan kota Probolinggo. Perkembangan wilayah pesisir di kota Probolinggo sangat ditunjang oleh sarana transportasi baik darat maupun laut dan dari berbagai bentuk bangunan di dalam pelabuhan dan bentuk dermaga yang sangat memadai sebagai tempat berlabuhnya perahu dan kapal (Ajeng, 2011: 2). Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan ini bersifat rekonstruksi, yaitu kelanjutan dari pembangunan yang sudah ada, namun secara fisik pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang dimulai sebagai suatu hal yang baru. Sekarang telah ada ratusan kapal ikan yang sebelumnya bersandar di dermaga lama yakni Pelabuhan Tanjung Tembaga, kota Probolinggo berpindah ke pelabuhan perikanan pantai serta dimulainya transaksi pelelangan ikan di tempat itu. Sejak saat ini transaksi perikanan berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Dalam pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Pemerintah Provinsi berkewenangan menangani pengelolaan dermaga. Sedangkan Pemerintah Kota Probolinggo di beri kewenangan mengelola tempat pelelangan ikan tangkap. Pendapatan Asli Daerah dari pelabuhan baru ini sepenuhnya menjadi hak milik provinsi. Dengan adanya Pelabuhan Perikanan Pantai pemerintah kota berharap nelayan Mayangan, dapat memaksimalkan Pelabuhan Perikanan Pantai sebagai sarana penunjang perbaikan ekonomi nelayan itu sendiri.

Secara tradisional setelah nelayan memperoleh hasil ikan tangkapannya, mereka lalu mencoba menjual sendiri kepada konsumen setempat melalui barter atau dengan nilai uang tertentu yang biasanya ditentukan oleh konsumen. Kegiatan ini tidak terorganisir dengan baik sehingga kurang efisien dan tidak produktif, mutu ikan tidak dijaga dengan baik sehingga harga ikan cenderung menurun. Perkembangannya akan lain dengan adanya upaya bahwa pemasaran ikan harus dirubah yakni dari ikan yang dijual sendiri-sendiri menjadi ikan yang dijual secara lelang dan terorganisir sehingga harga tidak ditentukan oleh pembeli dan mutu ikan dapat dipertahankan serta nilai jual yang diperoleh nelayan lebih besar. Melihat kenyataan tersebut, pelaksanaan lelang akhirnya menjadi kebutuhan nelayan. Menurut mahyudin (2008) agar proses pelelangan ikan ini berjalan lancar, pemerintah telah membangun tempat pelelangan ikan yang ada di pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang tersebar diseluruh Indonesia. Tempat pelelangan ikan di suatu pelabuhan perikanan merupakan sentral kegiatan perikanan tangkap. Dengan demikian semakin berfungsinya tempat pelelangan ikan untuk aktifitas tersebut maka semakin berfungsi pula suatu pelabuhan perikanan. Menurut UU no. 31 tahun 2004 pasal 65 tentang perikanan disebutkan bahwa pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan perikanan kepada pemerintah daerah dan menugaskan untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan dibidang perikanan, termasuk disini adalah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Tujuan pengaturan tata niaga oleh pemerintah agar proses tata niaga ikan berjalan tertib

sehingga nelayan sebagai produsen dan pembeli atau konsumen sama-sama memperoleh manfaat dan saling menguntungkan.

Pelabuhan Perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan yang dapat menjamin suksesnya aktifitas usaha perikanan tangkap di laut dan berfungsi sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai akan mempengaruhi kegiatan produksi perikanan di wilayah laut dan darat dalam kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh pekerja di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Agar kegiatan-kegiatan perikanan masyarakat nelayan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan adanya peran serta dari pemerintah provinsi untuk pengembangan pelabuhan sehingga dapat meningkatkan aset pelabuhan dan memperlancar kegiatan perikanan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka peneliti mengambil judul : “Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Sektor Perikanan”

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di Probolinggo?

2. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di Probolinggo
2. Untuk mendeskripsikan Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di Probolinggo

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*), baik secara akademis maupun praktis mengenai peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Kegunaan Akademik
 - a) Diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan secara konseptual mengenai peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan yang ada di Probolinggo.

- b) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih konkrit mengenai pembangunan di sektor perikanan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.
- c) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi seluruh *stakeholder* yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Kota Probolinggo yang berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintahan (Dinas Kelautan dan Perikanan di Probolinggo serta dinas yang terkait lainnya) dalam merencanakan ataupun melaksanakan pengembangan program pembangunan daerah.

A. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas latar belakang penelitian mengenai peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari sektor pengembangan pelabuhan. Selain itu bab ini juga berisi rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan pengertian, pandangan, dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan berkelanjutan dan pelabuhan perikanan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan keabsahan data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selana penelitian. Dalam bab ini juga akan disertai saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan yang telah dicapai

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa kemunculan Pemerintah Daerah di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Indonesia dengan nama awal “Negara Kesatuan Republik Indonesia” sangat identik dengan sentralistik, yaitu kekuasaan terpusat. Pergeseran sentralistik ke arah desentralisasi, konsekuensinya ditandai dengan pelaksanaan *local government*, yang memiliki tiga esensi yaitu pertama Pemerintah Daerah sebagai organ yang melaksanakan fungsi yang didesentralisasikan, kedua sebagai Pemerintah Daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi, dan ketiga sebagai daerah otonom lokasi dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri (Muluk, 2003; hal.63)

1. Desentralisasi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 7, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah jadi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini juga berarti bahwa daerah akan menjadi lebih eksis jika benar-benar mampu mengelola sumberdayanya sendiri. Rondonelli dalam Oentarto (2004;hal.7-9) mengatakan desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah. Dalam hal kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah, kebijakan tersebut disebut devolusi. Tetapi apabila kewenangan dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang ditugaskan di daerah, maka hal tersebut masuk dalam kategori kebijakan Dekonsentrasi.

Desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang selanjutnya disempurnakan oleh Undang-Undang No 32 tahun 2004, menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Terdapat empat tujuan yang hendak dicapai dalam kerangka desentralisasi menurut Undang-Undang No 22 tahun 1999, yaitu:

- a. Memberdayakan masyarakat,
- b. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat,
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan
- d. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Sedangkan dalam konsideran dan pembukaan Undang-Undang No 32 tahun 2004, ditegaskan bahwa “pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”. Namun pada dasarnya, kedua Undang-Undang tersebut memiliki semangat yang sama bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah secara partisipatif. Selain itu, berdasarkan tujuan, isi dan semangat yang dibawa oleh 2 Undang-Undang pemerintahan daerah tersebut, dapat diartikan bahwa telah terjadi pergeseran model pemerintahan lokal bila dibandingkan dengan kebijakan desentralisasi

sebelumnya yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1974. Saat ini *structural efficiency model* telah bergeser menjadi *local democracy model*. Kebijakan desentralisasi terbaru ini yang terakhir ini lebih mempertegas fungsi desentralisasi untuk mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat lokal. Selanjutnya desentralisasi ini melahirkan *political variety* untuk menyalurkan *local voice* dan *local choice*. Dalam model ini jelas terlihat kebijakan desentralisasi di Indonesia menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan kekuasaan dan alat perlengkapan negara yang ditingkatkan lebih atas kepada bawahannya guna memperlancar pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, hal tersebut menurut Supriyatna (1996:hal.1). Pernyataan tersebut mengarah kepada pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 8 dimana dekonsentrasi adalah merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Propinsi. Dalam pelaksanaannya, instansi yang melaksanakannya adalah dinas propinsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Propinsi.

Latar belakang adanya Dekonsentrasi ini karena ada kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah pusat yang harus dilakukan di daerah. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan tugas-tugas. Kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain

yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Karena pemerintah pusat tidak mempunyai instansi vertikal di daerah, maka wewenang melaksanakan kegiatan tersebut dilimpahkan kepada daerah. Sesuai dengan pengertiannya, karena wewenang tersebut sebenarnya merupakan wewenang pemerintah pusat, maka pendanaan atas pelaksanaan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN. Sebagai konsekuensinya, jika pada kemudian hari kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan, maka pendapatan tersebut secara otomatis akan menjadi hak dari Pemerintah Pusat.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Secara etimologis, otonomi berasal dari kata latin, yaitu *Autos* yang artinya sendiri, dan *Nomos* yang berarti aturan, itu menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Membahas tentang otonomi daerah, kita tidak dapat terlepas dari konsep desentralisasi karena otonomi daerah merupakan bagian dari konsep desentralisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh MR. Khairul Muluk (2003:63) bahwa :

“Cakupan istilah desentralisasi menunjukkan bahwa desentralisasi itu dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, desentralisasi mencakup konsep devolusi (desentralisasi dalam arti sempit), dekonsentrasi, dan delegasi yang mencakup pula privatisasi. Dalam khazanah sejarah Indonesia dikenal pula cakupan yang agak berbeda selain cakupan seperti diatas, yaitu *medebewind* dan *vrij bestuur*.”

Otonomi sendiri menurut Kaho (1997:14) memberikan arti Otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri, sebagaimana yang dikemukannya sebagai berikut : Mula-mula otonomi atau berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak atau kekuasaan atau kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Dari pengertian-pengertian diatas, konsep otonomi daerah akan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, mengelola sumberdaya yang dimiliki daerah, serta mewujudkan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu berupa peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan antara pusat dan daerah. Jadi secara umum, otonomi daerah memiliki ciri-ciri seperti yang diungkapkan oleh Bratakusumah (2004:53) yaitu :

- a. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar.
- b. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya.
- c. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangan dalam membiayai kegiatan rumah tangga pemerintahannya.
- d. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

Pelaksanaan selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, seperti yang diungkapkan oleh Kaho (1997 : 66-69) yaitu :

a. Manusia pelaksanaannya harus baik

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dan baik akan berjalan lancar apabila manusia pelaksanaannya baik. Dalam posisi ini, manusia sangat penting karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/bergerak sebagai penggerak roda organisasi pemerintahan.

b. Keuangan harus cukup dan baik.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.

c. Peralatan harus cukup dan baik.

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah.

d. Organisasi dan Manajemennya harus cukup dan baik.

Organisasi yang dimaksud adalah struktur yaitu susunan terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungan satu dan lainnya. Manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Selanjutnya Kaho (1997 : 88-89) mengemukakan bahwa suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
- b. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijakan daerah.
- c. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
- d. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

Kemampuan aparatur pemerintah daerah dari keempat atribut tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah suatu daerah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik atau tidak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah ini sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksananya atau aparatur pemerintah itu sendiri. Sedangkan tujuan dari pemberian wewenang terhadap daerah otonom, seperti diungkap oleh Maskun dalam Supriyatna (1996:43) adalah meliputi :

- a. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan sosial budaya masyarakat.
- d. Untuk demokratisasi.

Tujuan otonomi daerah yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dalam Halim (2004:23) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, latihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan bila dilihat dari kepentingan Pemerintah Daerah terdapat tiga tujuan menurut Halim (2004:23) :

- a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal atau daerah.
- b. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- c. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut penjelasan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa tujuan pemberian otonomi daerah, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang dengan lebih baik, hal sama diungkapkan oleh Diana Conyers dan Peter Hills dalam Bratakusumah (2013:13) yang mengemukakan perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu di masa yang akan datang. Sebelum melangkah lebih jauh dalam memahami perencanaan pembangunan wilayah secara umum, terlebih dahulu perlu di pahami yang dimaksud dengan perencanaan. Menurut Moekijat dalam Hadiwijoyo (2012:05) perencanaan didefinisikan sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah hal untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
- b. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana harus melakukan
- c. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan

Mengacu pada beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh para ahli, Arsyad dalam Hadiwijoyo (2012:06) berpendapat bahwa terdapat empat dasar elemen perencanaan, yaitu:

- a. Merencanakan berarti memilih
- b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
- c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
- d. Perencanaan berorientasi ke masa depan

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahap awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahap awal ini, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan, pedoman, acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Menurut Tjokroamidjojo (1985:12) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Istilah “Perencanaan Pembangunan” khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi, “perencanaan” diartikan berbeda beda dalam berbagai macam buku. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:07) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternative atau keputusan yang didasarkan pada data atau fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan aktifitas kemasyarakatan, baik bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset atau penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data hingga studi lapangan atau kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual atau dokumentasi maupun eksperimental. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja tanpa melihat realita

dilapangan secara langsung. Data – data secara fakta di lapangan sebagai data primer merupakan ornament paling penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam perencanaan pembangunan. Seringkali terdapat kesalahpahaman seakan-akan perencanaan berarti kegiatan menyusun rencana saja. Padahal perencanaan merupakan suatu proses kegiatan usaha terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan juga evaluasi. Menurut Undang-Undang No 25 tahun 2004 pasal 8 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ada beberapa tahapan perencanaan yaitu:

- a. Penyusunan rencana
 1. Penyiapan rancangan awal perencanaan pembangunan
 2. Musyawarah perencanaan pembangunan, dan
 3. Penyusunan rancangan akhir perencanaan pembangunan
- b. Penetapan rencana
 1. RPJP Nasional dengan UU dan RPJP daerah dengan perda
 2. RPJM dengan peraturan presiden dan RPJM daerah dengan kepala daerah
 3. RKP/RKPD dengan peraturan presiden/kepala daerah
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana
- d. Evaluasi kinerja

Keempat tahapan perencanaan dilakukan secara bertahap, tersusun dan berkelanjutan sehingga dapat membentuk siklus perencanaan yang menyeluruh.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsure-unsur perencanaan, pembangunan dan daerah. Kuncoro (2012:03) memberikan definisi perencanaan pembangunan sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, melainkan perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Secara lebih detail Suryadi dan Bratakusumah (2003:07) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

Suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas. Dalam hal ini berarti perencanaan pembangunan daerah akan membentuk 3 hal pokok yang meliputi; perencanaan komunitas, menyangkut suatu daerah dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses suatu kegiatan yang bertahap dimana proses tersebut melibatkan berbagai unsure di dalamnya dalam mengelola sumber daya yang ada seefektifitas mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Melihat sangat kompleks dan komprehensifnya masalah yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan daerah ini, jadi perencanaan yang baik sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan pembangunan daerah

harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks itu, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan serta sumber daya lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Riyadi dan Bratakusumah (2003:11-15) dalam perencanaan pembangunan daerah ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih baik serta dapat diimplementasikan di lapangan.

Adapun aspek-aspek tersebut antara lain:

- a. Aspek lingkungan
- b. Aspek potensi dan masalah
- c. Aspek institusi perencanaan
- d. Aspek ruang dan waktu
- e. Aspek legalisasi kebijakan

C. Peran Pemerintah Daerah

Melaksanakan tugas pembangunan sangat penting dan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan hanya pemerintah semata-mata. Akan tetapi, meskipun demikian harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. *Stabilisator*, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. *Innovator*, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi system, prosedur dan metode kerja.
- c. *Modernisator*, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, system pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya

manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. *Pelopor*, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. *Pelaksana sendiri*, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian, (Blakely, 1989: 78-81) dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator.

- a. Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi

atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterahkan perekonomian di sekitar.

- b. *Koordinator*, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pembangunan daerah yang atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. *Fasilitator*, pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. *Stimulator*, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

Pitana dan Gayatri (2005:95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi sumber daya alam daerahnya sebagai:

- a. *Motivator*, dalam pengembangan pembangunan, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pengembangan sumber daya alam terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang sumber daya alam menjadi sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pembangunan dapat berjalan dengan baik
- b. *Fasilitator*, sebagai fasilitator pengembangan potensi sumber daya alam peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh instansi instansi terkait agar pembangunan dapat cepat terwujud. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. *Dinamisator*, dalam pilar *Good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pembangunan.

Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Pengoptimalan Peran Pemerintah

a. Ketersediaan Anggaran

Pemerintah kota memerlukan dukungan financial dalam menyelenggarakan perannya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi

seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. (Hadrianus Suharyanto, Wahyudi Kumorotomo dan Erwan A. Purwantoro (ed). 2005:2).

Peran strategis anggaran daerah semakin menonjol karena dia merupakan alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, menetapkan otorisasi pengeluaran di masa mendatang, sebagai sarana pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat motivasi pegawai, serta alat koordinasi bagi seluruh aktivitas berbagai unit kerja dalam birokrasi pemerintah. Maka prinsip pokok yang menekankan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah pada kepentingan public menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah (Kumorotomo, 2005:13).

Suharyanto dalam (Kumorotomo, 20015:4) menyatakan beberapa alasan pentingnya anggaran, antara lain:

- 1) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya tuntunan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sedangkan ketersediaan sumber daya sangat terbatas, anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan dan trade off.

- 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran public merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana

Kesuksesan dan kelangsungan hidup organisasi dalam menyisiati pengaruh lingkungan sangat tergantung pada kapasitas dalam merencanakan, menggali, menggerakkan, dan mengelola sumber daya manusia maupun mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan modal utama pemerintah untuk merealisasikan suatu program dan memfasilitasi dalam terwujudnya pembangunan. Sarana dan prasarana yang memadai lebih memudahkan pemerintah untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan. Selain itu sarana dan prasarana juga bisa menjadi optimal atau tidaknya pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah ada, bahkan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana terbaru apabila sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak untuk digunakan.

Ketersediaan sarana dan prasarana adalah kepemilikan asset yang menunjang kegiatan untuk mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat.

c. Kemitraan (*Partnership*)

Prinsip *good governance* yang telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah daerah dengan

swasta merupakan suatu langkah yang biasa dilakukan dalam rangka menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan public dan pembangunan daerah. Kemitraan (*partnership*) membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan (<http://Wikipedia.com> diakses pada tanggal 30 Oktober 2015 pukul 19.23 WIB)

Yang dimaksud dengan kemitraan atau *partnership* dalam hal ini adalah kerjasama yang telah atau sedang dilakukan dengan pihak lain yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan (operasional) terbentuknya pembangunan berbasis masyarakat.

d. Peran serta masyarakat (*Participation*)

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan keputusan dan pengikutsertaan (John M. Echols Hasan Shadily, 1995:419).

Peran serta masyarakat merupakan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan pemerintah yang mengandung keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara. Dalam rangka mengoptimalkan peran dari pemerintah, maka peran serta masyarakat perlu menjadi sorotan utama, karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengoptimalan peran pemerintah diatas seperti ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, kemitraan, dan peran serta masyarakat dijadikan fokus oleh peneliti yang menunjukkan pada

kolaborasi antara teori dengan melihat kondisi lokasi dan situs penelitian tersebut saling berkaitan.

D. Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*)

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah proses usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Suryono, 2006: h.2). Dalam artian pembangunan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata tetapi juga aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Selain itu, Pembangunan tidak hanya pada negara maju saja tetapi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia pembangunan merupakan hal yang paling utama.

Pembangunan di negara berkembang dikenal dengan istilah administrasi pembangunan. Berdasarkan pendapat Siagian (2003: h.4) administrasi pembangunan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yang pertama administrasi dan yang kedua adalah pembangunan. Yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha/ rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation bulding*)

Ide pokok dari pendapat Siagian (2003: h.4) adalah:

Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah ke modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunannya ditujukan kepada usaha untuk membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Dari penjelasan diatas maka administrasi pembangunan didefinisikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa negara untuk terus tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir (Siagian, 2003: h.5). Dari pengertian tersebut Bintoro Tjokroaminoto (1994: h.9-10) menyimpulkan ciri-ciri dari administrasi pembangunan diantaranya:

1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang.
2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya yang efektif.
3. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa yang akan datang.
4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah.

5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang.
6. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparaturn pemerintah juga bisa sebagai penggerak perubahan (*agents of change*).
7. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

2. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* (Masa Depan Bersama), tugas dari sidang majelis PBB tersebut adalah untuk (a) mengusulkan strategi lingkungan jangka panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan mulai tahun 2000, dan (b) mengidentifikasi bagaimana hubungan antar manusia, sumberdaya, lingkungan dan pembangunan dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional dan internasional (Mitchell dkk, 2007: h.31). Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial

Menurut Ginanjar Kartasasmita (Riyadi dan Bratakusumah, 2004: h.4) memberikan pengertian pembangunan secara sederhana yaitu suatu proses

perubahankearahyang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Todaro (2000: h.21) berpendapat paling tidak ada tiga komponen yang dijadikan dasar untuk memahami pembangunan yang hakiki yaitu: (a) Kecukupan (*sustenance*) yaitu terpenuhinya semua hal yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia yang meliputi pangan, sandang, papan kesehatan dan keamanan. (b) Jati diri (*Self Esteem*) yaitu adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa diri pantas dan layak untuk mengejar atau melaksanakan sesuatu dan sebagainya. (c) kebebasan (*freedom*) yaitu kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-spek materiil dalam kehidupan.

Pemerintah daerah selaku salah satu *stakeholders* dalam setiap tahap kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Dalam Fauzi dkk (2001: h.4) diuraikan pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang lingkungan hidup memiliki beberapa pengertian yaitu:

- a. Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan ekosistem setempat
- b. Menghormati kearifan tradisional lokal yang sudah dikembangkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari.
- c. Tidak berdasarkan batas administratif tetapi berdasarkan batas ekologi (*bioregion*)

- d. Meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan setempat dan bukan menghancurkan daya dukung ekosistem dengan eksploitasi yang melebihi daya dukung.
- e. Pelibatan secara aktif masyarakat adat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan (menentukan) dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

3. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Menindaklanjuti dari publikasi komisi bruntland dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future*, banyak upaya yang dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa tanpa pedoman atau prinsip, tidak mungkin menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan berkelanjutan, atau apakah suatu prakarsa konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Membuat pedoman atau prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu tantangan yang menarik, karena sistem sosial dan ekonomi serta kondisi ekologi tiap negara sangat beragam. Jadi tidak ada model solusi umum yang dapat dibuat. Dari berbagai dokumen maupun deklarasi yang dihasilkan dalam KTT terdapat 5 (lima) prinsip utama yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development*) yaitu :

1. Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*)

Edith Brown Weiss menyebutkan bahwa makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah setiap generasi umat manusia di dunia mempunyai hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan

generasi sebelumnya, Ada tiga dasar yang terkandung dalam prinsip keadilan antar generasi yaitu :

- a. Setiap generasi harus melakukan konservasi keragaman sumber daya lingkungan, agar generasi mendatang memiliki pilihan yang sama banyaknya dengan generasi sekarang dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan ;
- b. Setiap generasi harus menjaga atau memelihara kualitas lingkungan agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan dengan kualitas yang sama, sebagaimana yang dinikmati generasi sebelumnya.
- c. Setiap generasi yang menjamin hak akses yang sama terhadap segala warisan kekayaan alam dari generasi sebelumnya dan harus melindungi akses ini untuk generasi mendatang.

2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*)

Prinsip ini menekankan pada keadilan dalam sebuah generasi umat manusia, termasuk di dalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau tepatnya kesenjangan antara individu dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup. Menurut Mas Achmad Santosa, prinsip ini sangat berkaitan erat dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan karena :

- a. Beban dan permasalahan lingkungan dipikul oleh masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi ;

- b. Kemiskinan menimbulkan akibat degradasi lingkungan, karena masyarakat yang masih dalam taraf pemenuhan *basic need* pada umumnya tidak memiliki kepedulian lingkungan ;
- c. Upaya-upaya perlindungan dapat berakibat pada sektor-sektor tertentu yang lain ;
- d. Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan pengetahuan, ketrampilan, keberdayaan serta struktur pengambilan keputusan dapat menguntungkan anggota masyarakat tertentu dan merugikan kelompok lain.

3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ancaman berarti atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan alasan untuk pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Menurut Mas Achmad Santosa, dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh :

- a. evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan
 - b. penilaian dengan melakukan analisis risiko dengan menggunakan berbagai opsi (pilihan).
- ### 4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*) ;

Potensi keragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia. Apalagi laju kerusakan dan kepunahan keragaman hayati semakin besar maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Prinsip perlindungan keragaman hayati merupakan prasyarat bagi berhasilnya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi. Sebagai contoh dalam keadaan masyarakat lokal (*indigenous people*) mengalami kehilangan atau keterputusan dari ekosistemnya akibat kepunahan keragaman hayati, maka tertutup akses terhadap tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang layak. Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan species dari keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.

5. Internalisasi biaya lingkungan. (*Internalisation of environmental cost and incentive mechanism*).

Rasio pentingnya diberlakukan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan di mana penggunaan sumber daya alam kini merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar. Sebagai akibatnya kepentingan yang selama itu tidak terwakili dalam komponen pengambilan keputusan untuk penentuan harga pasar tersebut menjadi terabaikan dan menimbulkan kerugian bagi mereka.

Kelima prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai prinsip pokok atau utama dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Walaupun demikian, konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ini telah jelas memberikan petunjuk, akan tetapi tidaklah mudah untuk melaksanakannya. Otto Soemarwoto menyebutkan agar pembangunan dapat

terlanjutkan, tiga syarat harus dipenuhi, yaitu ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Konsep yang diajukan oleh Otto Soemarwoto ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang diajukan oleh Stockholm Environment Institute (1996) yang mengembangkan suatu sistem yaitu Sistem Sosio Ekologi yang terdiri dari atas 3 sub-sistem, yang masing-masing berkenaan dengan masyarakat manusia, lingkungan hidup dan ekonomi.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di atas dapat dijadikan parameter untuk menilai sejauhmana kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dianalisis kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati yang berorientasi pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagai berikut :

Dalam Kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang *“The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders”*, terdapat resolusi tentang *“Criminal justice management in the context of accountability of public administration and sustainable development”*. Resolusi itu antara lain menghimbau negara anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi profesional nonpemerintah ; agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, mempertimbangkan masalah *“accountability and sustainability”*. Resolusi itu antara lain didasarkan pada pemikiran / pertimbangan, bahwa

- a. penyelenggara/administrator peradilan (pidana) bertanggungjawab bagi terselenggaranya peradilan (pidana) yang efisien dan manusiawi ;

- b. manajemen peradilan (pidana) merupakan bagian dari administrasi publik yang bertanggungjawab pada masyarakat luas;
- c. penyelenggaraan peradilan (pidana) harus merupakan bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya yang berkelanjutan (*a policy of sustainable development of resources*), termasuk “*ensuring justice*” dan “*the safety of citizens*”.

Dalam “*working paper*” yang merupakan dokumen penunjang kongres (dokumen A/CONF.169/6) dijelaskan, bahwa adalah penting bagi semua aspek dari penyelenggaraan sistem peradilan (pidana) untuk sejauh mungkin bertanggungjawab agar sistem peradilan pidana mendapat kepercayaan dan respek dari masyarakat (“*to gain public trust and respect*”). Agar mendapat kepercayaan dan respek masyarakat maka sistem peradilan harus terbuka dan transparan (“*must be open and transparent*”). Ditegaskan pula, bahwa akuntabilitas sistem peradilan pidana merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik (“*accountability of the criminal justice system is part of concept of good governance*”) yang pada gilirannya akan menjamin keberhasilan masyarakat yang berkelanjutan (“*sustainable development*”).

4. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan setiap elemen dasar pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang. Dalam jurnalnya Askar jaya menuliskan beberapa strategi pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan aktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomu yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara semakin meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi mendatang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktifitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti

c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mngutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia tersebut mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang ompleknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan sehingga merupakan tantangan yang utama dalam kelembagaan.

d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pelaksanaan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dan dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan, hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi.

5. Indikator/ Kriteria Pembangunan Berkelanjutan

Indikator / Kriteria pembangunan berkelanjutan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, maka indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-aspek tersebut diatas, yaitu aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Djajadiningrat (2005, h.17) menyatakan bahwa terdapat aspek dalam pembangunan berkelanjutan yang perlu diperhatikan:

1. Keberlanjutan ekologis

2. Keberlanjutan ekonomi
3. Keberlanjutan sosial dan budaya
4. Keberlanjutan politik
5. Keberlanjutan pertahanan keamanan

Pada perkembangannya, pembangunan berkelanjutan juga ditujukan untuk mencari strategi inovatif untuk merubah struktur kelembagaan dan kebijakan serta perubahan perilaku dari tingkat individu hingga tingkat global. Menurut Warren (Setiadi, 2008:1) kriteria ideal dalam sebagai indikator pembangunan berkelanjutan adalah:

- a) Merefleksikan suatu dasar atau fundamen ekonomi dalam jangka panjang dan sosial lingkungan bagi generasi yang akan datang
- b) Mudah dipahami dan jelas: sederhana, dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat
- c) Dapat dikuantitatifkan
- d) Sensitif terhadap perubahan lokasi atau group masyarakat
- e) Prediktif dan antisipatif
- f) Memiliki acuan atau nilai ambang relatif mudah untuk dikumpulkan atau digunakan.
- g) Aspek kualitatif: metodologi yang digunakan untuk membangun indikator harus jelas terdefiniskan dengan akurat, diterima secara ilmiah dan sosial.
- h) Trend yang representatif

Operasionalisasi atau implementasi konsep pembangunan berkelanjutan memerlukan indikator-indikator untuk menilai efektifitasnya, dalam arti

untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, program ataupun kebijakan dapat dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) atau tidak berkelanjutan (*unsustainable*).

E. Pelabuhan Perikanan

1. Perkembangan Pelabuhan Perikanan

Pada awalnya, pelabuhan hanya merupakan suatu tepian dimana kapal-kapal dan perahu dapat merapat dan membuang jangkar untuk bisa melakukan bongkar muat hasil tangkapan dan kegiatan lain. Untuk bisa melakukan kegiatan tersebut maka pelabuhan harus tenang terhadap gangguan gelombang sehingga pada masa itu pelabuhan berada di tepi sungai, teluk atau pantai yang secara alami terlindung dari gangguan ombak. Dengan berkembangnya kehidupan sosial dan ekonomi penduduk suatu daerah atau negara maka kebutuhan akan sandang, pangan dan fasilitas hidup lainnya dalam hal ini termasuk konsumsi ikan meningkat, dengan demikian diperlukan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Sejalan dengan itu, pelabuhan perikanan juga mengalami perkembangan. Pelabuhan tidak lagi harus berada di daerah terlindung secara alami, tetapi bisa di laut terbuka dengan wilayah yang lebih luas dengan fasilitas dan pelayanan yang lebih memadai (Triatmodjo, 1996)

2. Definisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan Pantai menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10 / MEN / 2004 tentang pelabuhan perikanan pada ketentuan umum pasal 1, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari

daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Sedangkan menurut Murdiyanto (2003), Pelabuhan perikanan adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

3. Perencanaan Pelabuhan Perikanan

Perencanaan pelabuhan perikanan meliputi penetapan rencana induk secara nasional, penetapan klasifikasi pelabuhan yang akan dibangun, penetapan wilayah perairan dan daratan tertentu yang menjadi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan.

Rencana pembangunan pelabuhan perikanan wajib mempertimbangkan

1. Potensi sumberdaya ikan dan pengolahannya
2. Potensi sumberdaya manusia
3. Dukungan terhadap pembangunan ekonomi wilayah baik regional maupun nasional
4. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Nasional
5. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Kabupaten atau Kota.

Menurut Kramadibrata (1985), untuk mencapai hasil yang maksimal maka perencanaan dan perancangannya haruslah dinilai dari segi segi sosial, politis, teknis, manajemen, finansial, atau ekonomis dan oprasional. Penilaian masalah masalah tersebut biasanya dicakup dalam studi kelayakan (*feasibility study*), antara lain:

1. Masalah sosial meliputi penilaian timbulnya dampak sosial dalam lingkup masyarakat daerah tersebut sebagai akibat dibangunnya suatu pelabuhan.
2. Masalah politis meliputi penilaian kegunaan politis terhadap pengembangan daerah dimaksud
3. Masalah teknis meliputi pemilihan letak ditinjau terhadap gangguan alam, teknis kontruksi (mekanika tanah, poondasi, mekanika teknik, beton atau baja atau kayu teknik lalu lintas), pelaksanaan pada saat pembangunan (*network planning*), perkiraan pembiayaan yang paling minimal mendapatkan keuntungan maksimal, ukuran perkiraan kapal dan jenis kapal yang ditampung di pelabuhan
4. Masalah manajemen yaitu pengelolaan perusahaan meliputi prosedur oprasional, administrasi personal material dan keuangan.
5. Masalah penilaian finansial yaitu penentuan apakah perusahaan pelabuhan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat keuangan, yaitu mengembalikan modal investasi (*return on capital invested*) dan dapatkah membantu investasi tambahan dari pendapatan yang diterima (*cash flow and balance sheets*).
6. Masalah operasional meliputi penilaian terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas pelabuhan (alur pelayaran, kolam pelabuhan, tambatan, gudang, jalan)

diharapkan dapat berfungsi secara maksimal (dalam hal ini pendayagunaan) sehingga kelancaran arus barang, lalu lintas kapal dan kegiatan lain dapat berimbang terhadap ukuran hasil kerja yang disyaratkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penggunaan metode dalam suatu penelitian bisa mempergunakan berbagai pilihan metode yang terlebih dahulu disesuaikan dengan sifat dan masalah yang akan diteliti. Metode dipilih yang berhubungan dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini, dalam membahas dan menyajikan data menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif. Tujuan dari pendekatan deskriptif ini yaitu untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Behubungan dengan hal ini Taylor dan Bogdan (1984: h.5) dalam suyanto (2010) menerangkan: “penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti”

Pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (2005: h.6) mengatakan bahwa;

“penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentukkata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala/ keadaan dan tidak termasuk untuk menguji hipotesis”.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan langsung pada Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini berdasarkan survei atau kenyataan yang didapatkan selama penelitian lapangan berlangsung serta diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai informan.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang berasal dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2006: h.97). Suyatno (2010) mengemukakan bahwa hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahap penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question*. *Research question* disebut juga sebagai “fokus penelitian”, adalah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diteliti atau dicari solusi melalui penelitian tersebut.

Fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data yaitu untuk membedakan antara data yang relevan dengan tujuan penelitian, tetapi fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas hal-hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini terdapat beberapa fokus penelitian yang ditentukan, yaitu:

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo.
 - a. Penyedia Sarana Fasilitas

- b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan pada sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo
 - a. Fasilitas pelabuhan yang memadai namun kurang perawatan
 - b. Kurang tepatnya sarana yang ada
 - c. Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna jasa

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan yang bertempat di jalan Pelabuhan Perikanan No.1 Kota Probolinggo. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan karena Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan merupakan salah satu pelabuhan di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi dari sektor perikanan yang dapat dikembangkan sehingga potensi tersebut mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan situs penelitian, merupakan tempat dimana peneliti mampu mendapatkan gambaran kondisi secara faktual dari objek yang diteliti sehingga keakuratan data yang diperlukan dapat diperoleh. Adapun situs dalam penelitian ini adalah:

1. UPT . Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

D. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data lapangan, peneliti berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat sehingga dapat menjadikan sumber informasi dalam kelancaran penelitian yang akan dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data yang digunakan pada saat melakukan penelitian, yaitu orang-orang (informan), peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen, dan data-data. Menurut Lofland dan Lofland, sebagaimana dikutip Moleong (2006: h. 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan secara langsung (observasi) dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Dalam penelitian ini dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informan yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi –informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan cara mengamati atau melakukan wawancara dengan informan yang berada dalam ruang lingkup peneliti. Dalam penelitian ini yang meliputi data primer adalah

- a. Kepala UPT dan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan
- b. Sub bag Sarana Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Probolinggo
- c. Sub bag Sarana Prasarana Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur
- d. Masyarakat nelayan dan non nelayan yang berhubungan dengan kegiatan pelabuhan.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen dan arsip-arsip dilapangan. Data sekunder yang diambil adalah berhubungan dengan pembangunan pelabuhan baru, diantaranya data-data atau *printout* hasil perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum berlaku. Dalam penelitian ini yang dimaksud peneliti yaitu;

- a. Rencana pembangunan jangka panjang Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan
- b. Rencana strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan
- c. *Master Plan* Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan
- d. Landasan hukum pembangunan pelabuhan perikanan
- e. Laporan Kinerja tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian cara untuk memperoleh atau mengambil data atau informasi disebut teknik pengumpulan data. Sehingga dapat menggunakan cara-cara yang tepat untuk mengumpulkan data yang akurat dalam menjawab

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan (*field reseach*) yang berarti dalam penelitian ini peneliti harus terjun ke lapangan baik obyek/ subyek penelitian yang kemudian dapat diperoleh data yang subyektif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Peneliti melaksanakan langsung di lapangan untuk dapat melihat dan mengamati keadaan lokasi penelitian dan setelah itu mengambil atau mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini yang diobservasi adalah mekanisme kerja, peran dan fungsi serta faktor penghambat dari pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.

2. Wawancara

Peneliti melakukan sesi tatap muka secara langsung kepada informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dengan komunikatif dan dialogis. Kemudian dari wawancara ini, peneliti dapat memperoleh suatu data dengan keakuratan tinggi. Untuk penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan yakni Bapak Nonot Wijayanto, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur serta masyarakat nelayan ataupun pengguna jasa pelabuhan tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dari penelitian ini melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber yang ada di lokasi misalnya, dalam bentuk daftar, tabel, dan sebagainya. Dokumen-dokumen yang diperoleh dari situs penelitian berupa laporan kinerja

tahunan pelabuhan, dan laporan mengenai mekanisme kerja, peran serta fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, serta foto yang terkait penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti, sebagai *instrument* penelitian atau instrumen kunci yang melakukan penelitian sendiri dan mengamati kegiatan-kegiatan terhadap obyek yang dituju yang berkaitan dengan penelitian.
2. Pedoman wawancara, (*interview guide*), yaitu susunan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pedoman wawancara ini berguna menjadi acuan atau arahan peneliti dalam pencarian data untuk menunjang perolehan data.
3. Catatan lapangan (*field note*), yaitu catatan yang berisi tentang berbagai informasi lapangan yang diperoleh pada saat penelitian.
4. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis, dan alat bantu lain untuk merekam dan mencatat data atau informasi-informasi dalam pencarian data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

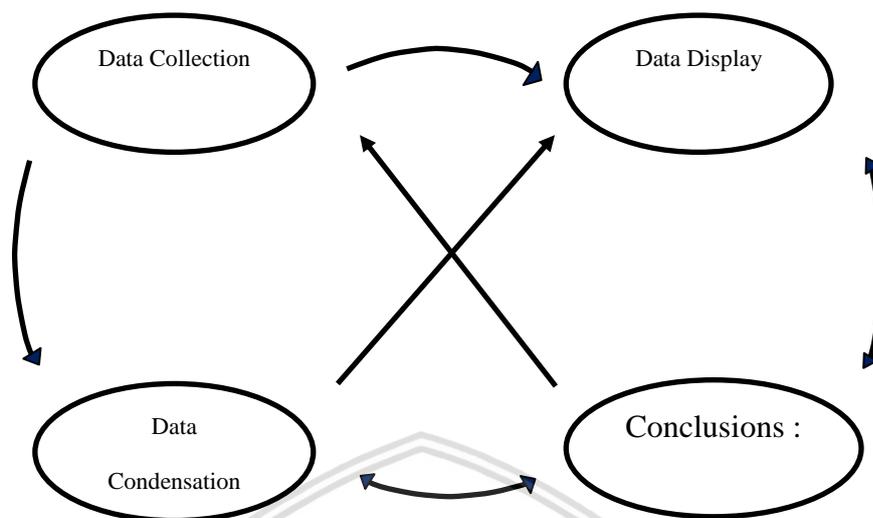
G. Analisis Data

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis diamati dengan mempelajari seluruh data dari berbagai sumber setelah itu mengadakan reduksi data dengan membuat rangkuman inti, langkah selanjutnya

menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dalam satu kelompok yang sama, kemudian pemeriksaan keabsahan data dan tahap yang terakhir disimpulkan. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan
2. Memaparkan informasi/fakta yang kemudian akan dianalisa dan dipaparkan hasilnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan
3. Penarikan kesimpulan dengan menguji validitas data sebelumnya agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan, maka peneliti menggunakan analisis data model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) di dalam analisis data kualitatif terdapat empat (4) tahap kegiatan aktifitas penelitian antara lain: *Data Reduction, Data Display, Data Collection dan Conclusion Drawing/Verifications*. Analisis ini disebut dengan analisis data model interaktif yang terdiri dari beberapa komponen dan tahapan, sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Analisis Miles, Huberman, Saldana 2014:14

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Peneliti menggunakan empat (4) teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Wawancara dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan pada bidang perikanan tangkap dan bidang sarana prasarana pelabuhan, serta pada para pengguna jasa pelabuhan. Observasi dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap peristiwa yang terjadi di UPT PPP Mayangan Kota Probolinggo. Dokumentasi berupa dokumen atau catatan dan foto diperoleh dari UPT PPP Mayangan Kota Probolinggo

2. Kondensasi Data (*Data Reduction*)

Setelah tahap pengumpulan data, selanjutnya data yang telah terkumpul tersebut dilakukan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, dan dirubah menjadi data yang utuh berupa rangkuman, tabel dan gambar.

Kondensasi data bertujuan untuk membentuk data yang valid sesuai dengan fakta yang ada, membatasi data-data yang tidak berkaitan dan membuang data yang tidak diperlukan. Dalam hal ini data tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peneliti berdasarkan keterkaitan terhadap peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data berupa uraian-uraian bersifat naratif, tabel, dan *network* (jaringan kerja). Data yang dianalisis disajikan, ditelaah, dan diperbandingkan dengan dasar empiric atau teori yang mendasari serta serta peraturan yang terkait dengan peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi yang diartikan sebagai pencatatan pola, penjelasan, dan alur sebab-akibat. Penarikan kesimpulan dengan menyatukan keseluruhan data dan menginterpretasikan data untuk menjadi semakin eksplisit dan menjadi pokok dalam penelitian. Dalam hal ini didukung dengan penemuan bukti-bukti lapangan dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari Unit Pelaksana Tekhnis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo yang menjadikan kesimpulan dapat tercipta dan kredibel.

Oleh karena itu kesimpulan menjawab rumusan masalah dan fokus penelitian yang dirancang sebelumnya.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Probolinggo

a. Letak Geografis

Letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $56,667\text{Km}^2$. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang terletak di daerah Pantura dekat dengan Laut Jawa dan merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dengan kota-kota (sebelah barat Kota): Pasuruan, Malang, Surabaya, Sebagai kota transit, letaknya sangat strategis, menjadikannya salah satu penghubung jalur kendaraan laut dan darat yang utama di Pulau Jawa khususnya daerah Jawa Timur. Selain itu Kota Probolinggo juga merupakan kota peralihan antara pegunungan dan pantai. Hanya berjarak 5 km kearah selatan saja sudah memasuki kawasan pusat kota dan juga kawasan peralihan karena memang dekat sekali dengan pantai. Daerah pantai juga mempengaruhi letak strategisnya yakni Kota Probolinggo sudah dilengkapi dengan 2 macam pelabuhan yakni pelabuhan umum (niaga) dan pelabuhan perikanan yang menjadi pusat utama arus bongkar muat barang serta menjadi kegiatan perikanan dan kelautan dan tempat transaksi hasil tangkapan ikan. Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi:

- 1) Sebelah Utara : Selat Madura
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Leces, Wonomerto, Sumberasih
Kabupaten Probolinggo
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat seluas 56,667 km² dengan ketinggian kurang kurang lebih 4 meter diatas permukaan air laut. Secara administrasi pemerintah Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan dengan luas 865,5 Ha, Kecamatan Kademangan terdiri dari 6 Kelurahan dengan luas 1.275,4 Ha, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan dengan luas 1.098 Ha, Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan dengan luas 1.065,3 Ha, dan Kecamatan Kedupok seluas 1.362,4 Ha dengan 6 Kelurahan.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Probolinggo diakses 25 Januari 2016)

b. Iklim

Pada umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan mencapai ±961 milimeter dengan jumlah hari hujan mencapai 55 hari. Curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan Desember, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus. Temperature rata-rata terendah mencapai 26°C dan tertinggi mencapai 32°C.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal. Musim penghujan berada pada bulan Nopember hingga April, sedangkan

musim kemarau berada pada bulan Mei-Oktober setiap tahunnya. Maka pada musim penghujan biasanya terjadi musim panceklik bagi kegiatan usaha perikanan. Selain itu pada bulan Juli-September di Kota Probolinggo terdapat angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan dapat mencapai 81 km/jam) dari arah tenggara ke arah barat laut, angin ini populer dengan sebutan “Angin Gending” sehingga pada rentang bulan ini pun nelayan harus sangat memperhatikan seandainya angin di Kota Probolinggo.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Probolinggo diakses 25 Januari 2016)

c. Karakteristik Sosial

Karakteristik sosial inilah penduduk Kota Probolinggo dapat dilihat dari segi etnik dan budaya masyarakatnya. Masyarakat Probolinggo dilihat dari segi sosial budaya sebagian berasal dari budaya agraris (petani dan nelayan) dan berkembang menjadi masyarakat urbanis. Sedangkan ditinjau dari segi suku, sebagian besar merupakan suku Jawa dan suku Madura yang terkenal ulet, lugas, terbuka, dan kuat dalam mengarungi kehidupan (berjiwa wiraswasta tinggi). Selain itu perpaduan masyarakat dan budaya yang masih asli dicerminkan dengan gotong royong, dan adat budaya yang khas. Hal ini dapat dipandang sebagai potensi masyarakat sehingga menjadi modal dalam peningkatan sumber daya manusia sehingga terbentuk masyarakat yang handal dan berkembang dan mudah tanggap terhadap kemajuan. Sehingga sasaran Kota Probolinggo bertujuan untuk pengembangan dalam segala bidang kehidupan masyarakat yang seluruhnya akan bermuara pada kemajuan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dapat diartikan penduduk mayoritas merupakan obyek dan subyek pembangunan.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo

Cikal Bakal Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo mulai didirikan pada tahun 2000 ketika Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Mayangan dibangun dengan gabungan dana dari APBN, APBN Provinsi Jawa Timur, APBN Kota Probolinggo serta dana luar negeri SPL-OECF. PPI Mayangan mendapat peningkatan status menjadi sebuah Pelabuhan Perikanan Pantai melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 12/MEN/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Perubahan status ini kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor : 061.1/1137/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Balai Pengelola Perubahan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo sebagai sebuah lembaga/Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah naungan Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur yang bergerak dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan serta tanggung jawab lanhsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Setelah proses pembangunanan fasilitas pokok selesai, pada tanggal 29 Desember 2008 PPP Mayangan bersama dengan PPP Tamperan di Kabupaten Pacitan diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. akan tetatpi karena pada saat itu fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan operasional masih dalam proses pembangunan serta terkendalanya

pemindahan nelayan dari pelabuhan lama (Pelabuhan Niaga tanjung Tembaga Probolinggo), maka kegiatan kepelabuhan secara minimal baru mulai dilaksanakan tanggal 17 februari 2010, hingga pada saat ini seluruh fasilitas pokok maupun pendukung dikelola oleh UPPPP Mayangan dengan berpedoman pada standar pelayanan public serta berdasarkan aturan yang berlaku.

Kemudahan akses menuju dan dari PPP Mayangan juga menjadi nilai tambah tersendiri. stasiun Probolinggo berjarak hanya 1,5 km dari pelabuhan dan setiap harinya dilintasi 12 rangkaian kereta dari/menuju berbagai kota besar di Pulau Jawa seperti Surabaya, Malang, Banyuwangi, Jember, hingga Jogjakarta dan Purwokerto.

Selain menggunakan moda transportasi ketera api, Kota Probolinggo juga dapat ditempuh menggunakan bus umum dari/ke berbagai kota seperti Surabaya, Malang, Banyuwangi, Jember, Situbondo hingga Denpasar. terdapat lebih dari 600 armada bus yang melayani jalur ini 24 jam setiap harinya. Untuk transportasi dari Terminal Bayu Angga ke PPP Mayangan (Pergi-Pulang) yang sejauh 8 km dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan kota. Bagi para investor atau pengguna jasa yang ingin bermalam, disekitar PPP Mayangan juga terdapat lebih dari 10 penginapan yang dapat digunakan dengan tariff bervariasi mulai standar bintang 1 hingga kelas Losmen/Homestay.

Sejak tahun 2013, disisi selatan wilayah PPP Mayangan juga telah dibuka sarana wisata mangrove yang dikelola swasta yaitu oleh CV. BeeJay Sarana Hiburan dengan nama BeeJay Bakau Resort. Sebagian dari lahan lokasi wisata ini (seluas 18.000 m²) masuk dalam area PPP Mayangan dan dikelola oleh pihak

swasta tersebut melalui sistem sewa lahan. Adapun potensi wisata yang dijual adalah berupa penelusuran melalui jalan setapak yang menembus hutan mangrove dan berakhir di sebuah restoran terapung. kedepan dilokasi wisata mangrove ini juga akan dibangun penginapan dan lahan perkemahan.

Menjadi salah satu pelabuhan perikanan terbesar di pesisir Utara Pulau Jawa Bagian Timur, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan terus berusaha untuk berkembang tidak hanya menjadi sekedar lokasi pendaratan ikan dan tambat labuh kapal penangkap ikan, melainkan menjadi pusat investasi di bidang perikanan tangkap di Indonesia. didukung oleh lokasi yang sangat strategis, dimana terletak hanya 2 km dari pusat Kota probolinggo, PPP Mayangan berada tepat pada jalur akses utama pantai utara Pulau Jawa Bagian Timur yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Bali, dua wilayah yang menjadi sentra ekonomi di Indonesia bagian timur.

Saat ini kegiatan pelayanan dan pengelolaan di PPP Mayangan dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Mayangan Kota probolinggo yang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah naungan Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur.

Tujuan awal dibangunnya PPP Mayangan Kota Probolinggo adalah untuk menampung dan melayani aktivitas perekonomian berbasis perikanan yang dilakukan oleh nelayan baik pendatang maupun nelayan asli Kota Probolinggo dengan cara :

1. Menyediakan fasilitas pelabuhan yang mendukung operasional kapal perikanan;
2. Meningkatkan mutu dan kualitas hasil perikanan;
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta penyerapan tenaga kerja;
4. Meningkatkan peran serta Pelabuhan Perikanan sebagai fasilitas pada sektor perikanan.

Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu

1. Meningkatkan fasilitas Pelabuhan yang sesuai dengan masterplan;
2. Meningkatkan peran aktif pelayanan umum pada pengguna jasa fasilitas pelabuhan;
3. Mendukung upaya pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (usaha penangkapan ikan yang illegal, tidak tercatat dan tidak sesuai aturan);
4. Memfasilitasi peran investor local maupun non local yang akan mengembangkan usaha di PPP Mayangan Kota Probolinggo;
5. Mengadakan sosialisasi Usaha Perikanan dan Pelelangan Ikan di TPI

Sumber: Sub bag Tata Usaha UPT Mayangan Kota Probolinggo 2014

1. Visi dan Misi

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, PPP Mayangan Kota Probolinggo memiliki visi “*Menuju Pelabuhan perikanan Dengan Orientasi Pelayanan, Investor dan Wisata Edukasi*” artinya bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai sebuah pelabuhan perikanan, PPP Mayangan menekankan

pada pelayanan terbaik yang dapat diberikan bagi masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa untuk menjamin keberlangsungan usaha perikanan sebagai penyokong terciptanya iklim investasi di kawasan pelabuhan perikanan serta menjadikan kawasan pelabuhan perikanan sebagai salah satu pilihan kawasan wisata baru yang berbasis pendidikan.

Visi tersebut kemudian diwujudkan dalam enam buah misi perencanaan operasional yang strategis untuk meningkatkan koordinasi pemerintahan antara lain:

1. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima dan koordinasi dalam tugas operasional;
2. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan pada sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
3. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat kebutuhan dan pertumbuhan usaha perikanan;
4. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif guna menarik dukungan investor;
5. Mengembangkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
6. Mendukung pengembangan SDM di bidang Kelautan dan Perikanan

Usaha yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan di UPPPP Mayangan Kota Probolinggo untuk melaksanakan visi misi tersebut yakni:

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Pemberdayaan masyarakat perikanan diarahkan dengan penguatan modal, kelembagaan dan pemberian inovasi teknologi, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, serta mengupayakan kemudahan akses lembaga keuangan. Agar usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap harus mampu memberi keuntungan bagi semua pelaku utama dan usaha perikanan, pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

2. Mengembangkan usaha perikanan budidaya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan berbasis IPTEK.

Terbatasnya lahan usaha budidaya, baik budidaya ikan di perairan umum (waduk, rawa, dan sungai), budidaya air payau, dan budidaya laut dikembangkan sesuai daya dukung lahan dengan tidak mengabaikan kelestarian sumberdaya kelautandan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dan dikelola berbasis IPTEK.

3. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan, bahan baku industri pengolahan ikan, PAD dan devisa Negara

Hasil usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap di Mayangan Kota Probolinggo diharapkan dapat menyediakan bahan pangan serta bahan baku industri pengolahan ikan. Selain itu, juga diharapkan mampu meningkatkan PAD dan devisa negara baik melalui ekspor ikan segar maupun ikan olahan.

4. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Perikanan budidaya dan perikanan tangkap diarahkan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat dan dapat memberikan kesempatan untuk berusaha di sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang seluas-luasnya.

5. Menciptakan iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif

Peningkatan iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif dapat dilakukan melalui regulasi dan deregulasi serta ditunjang dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung (BBU, BBAP, dan PPI), pengembangan standarisasi pembenihan, pembudidayaan dan pengolahan ikan hasil budidaya serta pengembangan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan secara terintegrasi. Peningkatan produksi dan produktivitas budidaya perikanan dan kelautan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, disamping meningkatkan sarana dan prasarana produksi perikanan dan kelautan.

6. Memulihkan perlindungan sumberdaya dan lingkungannya.

Perikanan budidaya diarahkan untuk memperbaiki lingkungan pada kawasan pembudidayaan ikan dan membangun reservat sumber induk/benih ikan/udang bagi usaha pembudidayaan ikan dengan melakukan rehabilitasi jalur hijau (mangrove) pembangunan reservat dan perlindungan sumberdaya air bagi kegiatan budidaya, serta penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di UPPPP Mayangan Kota Probolinggo.

Sumber: Sub bag Tata Usaha UPT Mayangan Kota Probolinggo 2014

2. Tugas Pokok

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 14 tugas pokok dan fungsi dari pelabuhan perikanan, yaitu:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. Pelayanan bongkat muat;
3. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
4. Pelayanan dan distribusi ikan;
5. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
6. Tempat pelayanan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
7. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
8. Tempat pelayanan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
9. Pelaksanaan kesyahbandaran;
10. Tempat pelaksanaan fungsi karantina;
11. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
12. Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
13. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
14. Pengendalian lingkungan.

Sumber: Sub bag Tata Usaha UPT Mayangan Kota Probolinggo 2014

Akan tetapi sebagai UPT milik Dinas perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur, dalam pelaksanaan tugas UPPPP Mayangan Kota Probolinggo lebih mengacu kepada pedoman Susunan Organisasi dan tata kerja Unit Pengelola

Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penyiapan bahan serta perumusan rencana pengelolaan perubahan perikanan pantai;
2. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran;
3. Penyusunan rencana program penyelenggaraan penangkapan ikans erta pengujian penerapan standart penangkapan ikan;
4. Penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan pelayanan teknis kapal perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, analisa terhadap pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan., ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana/prasarana serta pelayaan teknis kapal perikanan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sumber: Sub bag Tata Usaha UPT Mayangan Kota Probolinggo 2014

Selain itu UPPPP Mayangan juga melaksanakan fungsi riset dan pendidikan dengan melaksanakan pengumpulan data serta menjadi tempat studi banding/prektek/prakerin maupun studi tour bagi beberapa instansi lain, Universitas dan sekolah, diantaranya :

1. Dirjen Perikanan Tangkap KKP – Jakarta
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Jawa Tengah – Semarang
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Banten - Serang
4. Pemerintahan Kabupaten Nатура – Kepulauan Riau
5. Tim Penganugerahan Gelar dan Tanda Jasa Kemendagri – Jakarta
6. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan – Semarang
7. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo – Pati
8. Pusat Penelitian Oseanografi Lipi – Jakarta
9. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I – Surabaya
10. Balai Penelitian Perikanan Laut – Jakarta
11. Akademi Perikanan Sidoarjo
12. Institusi Teknologi Sepuluh November – Surabaya
13. Institusi Perikanan Bogor
14. Universitas Diponegoro – Semarang
15. Universitas Brawijaya – Malang
16. Akademi Manajemen Informasi Dan Computer Taruna - Leces
17. SMK Negeri Kelautan Ansus - Papua
18. SMK Negeri 1 Lamboya – Nusa Tenggara Timur
19. Serta Beberapa SD Dan SMP Disekitar Kota Dan Kabupaten Probolinggo.

Sumber: Sub bag Tata Usaha UPT Mayangan Kota Probolinggo2014

3. Landasan hukum:

Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo dalam pembangunannya sudah seharusnya memiliki dasar hukum yang mengatur segala sesuatunya. Berikut ini adalah landasan hukum tersebut;

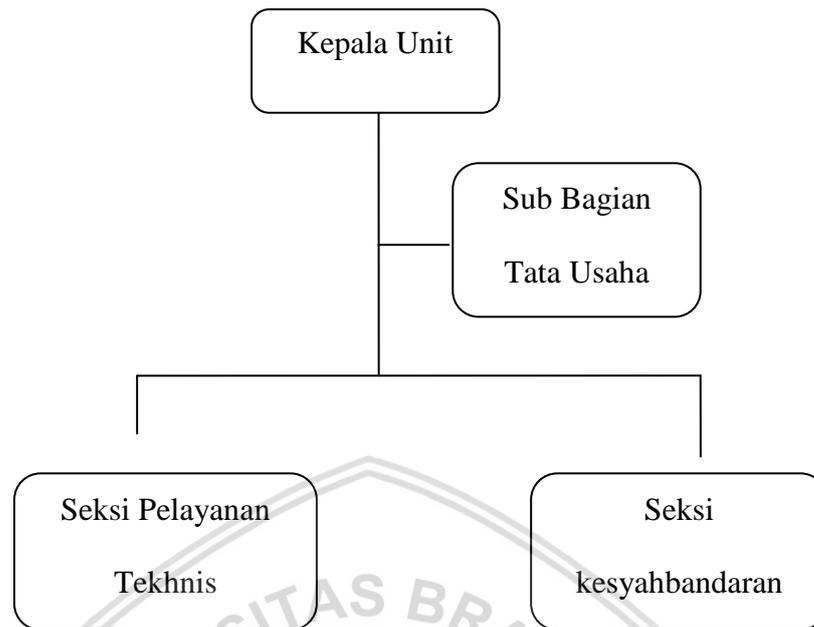
- a. undang-undang no 8 tahun 1974 jo undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
- b. undang-undang no 31 tahun 2004 jo undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan
- c. SK Menteri perikanan no.1082/kpts/OT-201/10/99 tentang tata hubungan kerja UPT pelabuhan perikanan dengan instansi terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan
- d. peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor: PER.08/MEN/2007 tentang organisasi dan tata kerja departemen kelautan dan perikanan
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2008 tentang organisasi dan tata kerja Pelabuhan Perikanan.
- f. peraturan daerah provinsi jawa timur no.9 tahun 2009 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 12/MEN/2004 tentang peningkatan status pangkalan pendaratan ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
- h. keputusan kepala dinas perikanan dan kelautan provinsi jawa timur nomor 061/6614/116.01/2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa timur.

Pembentukan susunan kepengurusan dalam pengelolaan pelabuhan sudah sesuai dengan landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan kepengurusan. Selain itu penarikan retribusi bagi kendaraan yang masuk ke dalam wilayah pelabuhan juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur no 9 tahun 2009 tentang retribusi pemakaian kekayaan Daerah. Saat ini Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan sudah diubah dari balai pengelola pelabuhan perikanan pantai mayangan kota probolinggo menjadi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur nomor 061/6614/116.01/2010 tertanggal juni 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja unit pengelola teknis dinas perikanan dan kelautan provinsi jawa timur.

Sumber: Sub bag Tata Usaha UPT Mayangan Kota Probolinggo 2014

4. Struktur Organisasi

Pada tahun 2013, PPP Mayangan juga dalam proses peningkatan status menjadi sebuah Unit Pelaksanaan Teknis dengan Kepala Pelabuhan dijabat oleh seorang pejabat eselon III. Oleh karena itu, sesuai dengan struktur organisasi yang tercantum dalam draft usulan eselonisasi tersebut, dalam pelaksanaan tugas kedinasan UPPPP mayangan sudah mulai menggunakan struktur organisasi yang baru sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Kerja di UPPPP Mayangan Kota Probolinggo

Sumber: Sub bag Tata Usaha UPT Mayangan Kota Probolinggo 2014

Dari struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan mengenai tugas dari masing-masing bagian skema tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Unit bertugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
3. Seksi pelayanan teknis mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan dan pelayanan jasa serta pemeliharaannya, melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan penyelenggaraan keamanan serta

koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan, menyusun dan menyiapkan rencana program pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan jasa pelabuhan perikanan, melaksanakan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan teknis.

4. Seksi kesyahbandaran mempunyai tugas memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan kapal yang akan kelaut, memeriksa ulang alat tangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan diatas kapal perikanan, pemeriksaan kapal dalam pelayaran, memeriksa persyaratan anak buah kapal sesuai dengan aturan disektor perikanan, tugas lain dalam mempungsiikan alur dan dermaga pelabuhan.

B. Penyajian data

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Menunjukkan institusi yang dikelola oleh aparatur yang ahli dan kompeten dibidangnya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, sedang produk hasil kelautan dan perikanan yang telah dikembangkan, dipertahankan dan dilestarikan secara optimal dan

berkelanjutan, sehingga mampu bersaing dengan sehat dalam lingkup regional maupun nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Salah satu usaha dari Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan untuk memajukan industri perikanan laut adalah membangun pelabuhan - pelabuhan perikanan modern di beberapa lokasi yang mempunyai potensi hasil tangkap yang tinggi. Salah satu lokasi yang dipilih oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan adalah di Mayangan Kota Probolinggo.

Sebagai salah satu prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) akan berfungsi sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan yang secara khusus sebagai pusat pembinaan dan peningkatan ekonomi perikanan. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur dan khususnya Kota Probolinggo. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan yang modern diharapkan juga dapat sebagai penggerak perkembangan industri perikanan modern di Jawa Timur. Untuk Propinsi Jawa Timur meskipun pada saat ini sudah cukup banyak pelabuhan - pelabuhan perikanan, akan tetapi keperluan suatu pelabuhan perikanan yang modern sangat mendesak, mengingat potensi perikanan tangkap di Jawa Timur sangat tinggi. Sejalan dengan paparan diatas, Nonot Wijayanto selaku Kepala UPT Pelabuhan menyatakan bahwa:

“ pemerintah disini yang dimaksud adalah dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa timur, untuk kebijakan yang harus ditaati dan dilaksanakan itu untuk kemajuan pelabuhan perikanan di Probolinggo, kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengola sebagian kecil

wilayah pelabuhan atau pinggiran pantai untuk digunakan sebagai investasi, edukasi, dan ekowisata, dan tentu saja meningkatkan PAD Kota Probolinggo”

(Wawancara tanggal, 14September 2015 di kantor UPT Probolinggo)



Gambar 3. Wawancara dengan Bpk Nonot Wijayanto selaku kepala Pelabuhan & Syahbandar.

Sumber: Data Primer hasil observasi peneliti tahun 2015

Adapun hasil wawancara dari Gambar 3 diatas untuk memperoleh data primer dan peran serta pemerintah dalam pengembangan pelabuhan. Dari hasil observasi peneliti rencana kerja PPP Mayangan tahun 2015 dan kedepannya sesuai dengan visi Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan yang menitik beratkan pada pelayanan masyarakat; pengembangan potensi investasi serta pelopor wisata edukasi berbasis perikanan. *Masterplan* rencana kinerja untuk tahun 2015 dalam pengembangan wisata edukasi menjadi prioritas utama karena bidang pelayanan dan investasi di UPPPP Mayangan telah berjalan dengan baik sehingga hanya perlu pembenahan dan peningkatan layanan.

a. Penyedia Sarana Fasilitas

Tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan salah satunya adalah menyediakan fasilitas pelabuhan yang membantu kegiatan

nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nonot Wijayanto selaku kepala PPP Mayangan Kota Probolinggo sebagai berikut:

“Tugas dari kita adalah memberikan fasilitas pada masyarakat nelayan, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan. Sarana yang kita sediakan adalah sarana yang berkaitan dengan tugas pokok produksi kita dalam operasional pelabuhan seperti fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.”

(Wawancara tanggal, 14 September 2015 di kantor UPT Probolinggo.)

Fasilitas dan sarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan yang ada sekian banyak, dikelompokkan menjadi tiga kategori. Adapun pengelompokkan tiga kategoritersebut yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut:

a.1. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok merupakan sarana dalam penyelenggaraan dan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Fasilitas pokok ini digunakan untuk menjamin keselamatan umum, termasuk juga untuk kegiatan perikanan seperti tempat berlabuh, tempat tambat dan bongkar muat hasil perikanan. Dalam pemanfaatan fasilitas pokok ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk pengembangan dan penambahan fasilitas pokok sedapat mungkin terus dilakukan sejalan dengan pengembangan dan peningkatan operasional pelabuhan yang dibutuhkan.

Tabel 1. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

NO	Fasilitas	Jumlah/ Volume	Keterangan	Fungsi
1.	Lahan/Tanah	20 Ha	Kondisi Baik	Lahan pengembangan pelabuhan
2.	Breakwater/ Pemecah Gelombang	P= 925m L=8m	Kondisi Baik	Melindungi armada-armada penangkapan yang ada di areal kolam pelabuhan dari gelombang/ombak besar
3.	Dermaga 1 Dermaga 2	P=700m L=9m P=75m L=6m	Belum Lengkap Kondisi Baik	Mendaratkan ikan hasil tangkapan sebelum dibawa ke TPI untuk dilelang
4.	Jalan Pelabuhan	P=1000 m L=8m	Kondisi Baik	Sarana untuk memperlancar distribusi hasil perikanan dan distribusi bahan perbekalan nelayan
5.	Revetment	P=700m L=8m	Kondisi Baik	Jalan untuk menuju ke tempat di mana armada-armada penangkapan milik nelayan ditambatkan.
6.	Kolam Pelabuhan	20.000m 2	Belum Sempurna	Tempat tambat labuh bagi armada penangkapan yang beroperasi di pelabuhan
7.	Alur Pelayaran	P=700m L=8m	Kondisi Baik	Bagian perairan yang berfungsi sebagai jalan masuk atau keluar bagi kapal-kapal yang akan memasuki kolam pelabuhan menuju ke dermaga.

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Tabel 1 tersebut menjelaskan beberapa fasilitas pokok yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebagai berikut:

a.1.1Lahan

Lahan yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki luas 20 Ha. Sebagian besar lahan yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan ini masih belum termaksimalikan dalam penggunaannya karena masih belum rampungnya pembangunan prasarana dilingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.

a.1.2Breakwater (Pemecah Gelombang)



Gambar4. Breakwater barat

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Breakwater merupakan suatu bangunan yang terdiri dari kumpulan batu-batu besar yang tertata sedemikian rupa, yang berada di sekeliling kolam pelabuhan. Breakwater berfungsi untuk melindungi kolam pelabuhan, khususnya kapal-kapal yang akan berlabuh, dari pengaruh gelombang atau ombak besar, sehingga kapal-kapal tersebut aman dalam melakukan kegiatan bongkar-muat.

Pembangunan breakwater dimulai pada tahun 2000 dengan jenis konstruksi menggunakan batu tumpukan (caisson) yang memiliki panjang 925 meter dan lebar 3 meter.

a.1.3 Dermaga



Gambar 5. Dermaga (sheet pile)

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Dermaga adalah suatu tempat pendaratan ikan yang ada di pelabuhan. Dermaga digunakan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan sebelum dibawa masuk ke TPI untuk dilelang. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki 2 dermaga yaitu dermaga landing beach dan dermaga PIER. Dermaga landing beach dibangun pada tahun 2003 yang saat ini masih belum lengkap dan dalam proses pembangunan (rehabilitasi). Dermaga pelabuhan ini memiliki panjang 700 meter dan lebar 9 meter yang dilengkapi dengan fender dari baja sebagai tempat mengaitkan tali agar armada tidak hanyut saat ditambatkan. Dermaga PIER dibangun pada tahun 2002 yang sudah siap beroperasi. Dermaga ini memiliki panjang 75 meter dengan lebar 6 meter dan dilengkapi dengan fender dan lampu. Jenis konstruksi pada dermaga ini terbuat dari cor dengan jenis fender yang terbuat dari kayu ulin.

a.1.4Jalan Pelabuhan



Gambar 6. Jalan Pelabuhan

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan membangun jalan pelabuhan dengan panjang 1000 meter dan lebar 8 meter dengan jenis konstruksi cor tulangan yang dibangun pada tahun 2006. Jalan pelabuhan dibangun sebagai sarana untuk memperlancar distribusi hasil perikanan dan distribusi bahan perbekalan maupun barang-barang lain yang diperlukan bagi armada penangkapan dan masyarakat nelayan.

a.1.5Revetment

Revetment merupakan bangunan pelindung pantai yang dibuat dalam arah sejajar garis pantai, yang mempunyai fungsi utama untuk mengendalikan laju angkutan sedimen dalam arah tegak lurus pantai (*cross-shoresediment transport*) sehingga lahan pantai di belakang revetment terlindungi. Revetment ini dibangun pada tahun 2000 dengan jenis konstruksi batu kosong 60-100 dan dalam kondisi yang baik. Revetment

pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki panjang 700 meter dan lebar 8 meter.

a.1.6 Kolam Pelabuhan



Gambar 7. Kolam Pelabuhan Mayangan

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Kolam pelabuhan merupakan lokasi perairan tempat kapal berlabuh, mengisi perbekalan, atau melakukan aktivitas bongkar-muat hasil tangkapan ikan. Kolam pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2000. Kolam pelabuhan memiliki luas 20.000 m² dengan lebar mulut kolam 150 meter dan kedalaman 2 meter. Kondisi kolam pelabuhan ini masih belum sempurna karena rencana pembangunan kolam pelabuhan ini memerlukan kedalaman 4 meter, sehingga masih diperlukan pengerukan lagi.

a.1.7 Alur Pelayaran

Alur pelayaran merupakan bagian perairan pelabuhan yang berfungsi sebagai jalan masuk atau keluar bagi kapal-kapal yang akan memasuki kolam pelabuhan menuju ke dermaga. Alur pelayaran di Pelabuhan

Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2000 dengan panjang 700 meter dan lebar 8 meter sedangkan kedalamannya -5meter

a.2 Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang difungsikan dalam penyelenggaraan operasional pelabuhan, yang mana keberadaan fasilitas ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat nelayan dan pengguna jasa pelabuhan lainnya yang memanfaatkan pelayanan pelabuhan. Adanya pengembangan dan pembangunan fasilitas fungsional, diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat nelayan dan pengguna jasa pelabuhan lain dalam kegiatan perikanan di lingkungan pelabuhan.

Tabel 2. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

NO	Fasilitas	Jumlah/ Volume	Keterangan	Fungsi
1.	Kantor Administrasi Pelabuhan	20m ²	Kondisi Baik	Tempat operasional pegawai pelabuhan
2.	Rambu Pelayaran	1 Unit	Kondisi Baik	Sebagai alat bantu navigasi pelayaran di lingkungan pelabuhan
3.	Lampu Suar	2 Unit	Kondisi Baik	Mempermudah nelayan atau pelayaran lain untuk masuk menuju ke areal dermaga
4.	Sumber Air Bersih (air tawar)	5m ³ /detik	Kondisi Baik	Penyediaan pelayanan berupa air tawar
5.	Genset	50 kVA	Kondisi Baik	Kebutuhan perkantoran, penerangan jalan
6.	BBM	8 Liter	Lewat SPDN	Tempat pelayanan bahan perbekalan BBM, seperti bensin dan solar
7.	Tempat Parkir Ikan (TPI)	20m ²	Kondisi Baik	Sebagai tempat parkir kendaraan yang masuk areal pelabuhan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan

Sumber *subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011*

Tabel 2 diatas merupakan beberapa fasilitas fungsional yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebagai berikut:

a.2.1 Kantor Administrasi Pelabuhan



Gambar 8 Kantor Administrasi pelabuhan
Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Kantor pelabuhan yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2000 dengan luas 20m². Bangunan kantor pelabuhan merupakan bangunan permanen yang kondisinya baik, yaitu digunakan sebagaimana mestinya.

a.2.2 Rambu Pelayaran

Rambu pelayaran merupakan alat bantu navigasi pelayaran yang pada umumnya terdapat di wilayah perairan sekitar pelabuhan, seperti pelampung, buoy navigasi, bendera, dan lain-lain. Rambu pelayaran yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan berupa lampu pandu alur yang dibangun pada tahun 2009, dimana kondisinya baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

a.2.3Lampu Suar

Lampu suar merupakan alat bantu navigasi dan pelayaran berupa lampu yang pada umumnya ditempatkan pada menara, sehingga dapat terlihat dari kejauhan oleh kapal yang hendak menuju ke pelabuhan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki 2 unit lampu suar yang dibangun pada tahun 2009 dengan konstruksi berupa tiang besi cor.

a.2.4Sumber Air Bersih (air tawar)

Sumber air bersih (air tawar) di areal Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) dengan debit 5 m³/detik. Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan warung serba ada kios/took yang terdapat di lingkungan pelabuhan

a.2.5Genset

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki 1 unit genset dengan kondisi baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang digunakan untuk kebutuhan perkantoran dan penerangan jalan.Genset yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dapat menghasilkan 50 kVA.

a.2.6BBM



Gambar 9. SPBU untuk kapal ikan

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki stasiun pengisian bahan bakar yang dikhususkan bagi keperluan nelayan. Khusus untuk bahan bakar Solar, terdapat pula layanan bahan bakar yang disebut SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan). Instalasi BBM ini dibangun pada tahun 2005 yang memiliki 1 buah tangki dengan kapasitas tangki pendam sebesar 8.000 liter.

a.2.7Tempat Parkir

Tempat parkir kendaraan bermotor di lingkungan pelabuhan perikanan yang dapat digunakan oleh umum ini memiliki luas 20m² dengan konstruksi lantai yang terbuat dari cor. Tempat parkir ini dibangun pada tahun 2005 yang kondisinya sampai pada saat ini masih baik.

a.2.8 Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)



Gambar 10. IPAL PPP Mayangan

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki fasilitas pengolahan limbah cair ikan berupa konstruksi beton bertulang, pasangan batu kali, tanah urug, dan konstruksi baja yang ditempatkan di dekat TPI. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) ini dibangun pada tahun 2009 yang memiliki luas bangunan 100m² dengan kapasitas sebesar 10 ton per hari.

a.2.9 Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



Gambar 11. Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Mayangan

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan yang didukung dengan fasilitas operasional berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang memiliki luas 400m². Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ini dibangun pada tahun 2004. Kondisi dari bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ini dalam keadaan baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada saat ini sistem lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah berjalan berjalan sebagaimana mestinya.

a.3 Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan sarana pelengkap yang mendukung keberadaan penggunaan dari fasilitas pokok dan fasilitas fungsional. Fasilitas ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Dengan adanya fasilitas penunjang ini diharapkan kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga sasaran pelayanan yang ingin dicapai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dapat terpenuhi. Beberapa fasilitas penunjang yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebagai berikut:

Tabel 3. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

NO	Fasilitas	Jumlah/ Volume	Keterangan	Fungsi
1.	Pos Jaga	9m ²	Kondisi Kurang Baik	Tempat menjaga keamanan di sekitar pelabuhan
2.	MCK	18m ²	Kondisi Baik	Sebagai fasilitas pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan
3.	Kios/Toko/Warung	30m ²	Kondisi Baik	Tempat menjual makanan dari pengunjung pelabuhan
4.	Musholla	100m ²	Kondisi Baik	Sebagai tempat ibadah
5.	Gedung Pertemuan Nelayan	300m ²	Kondisi Baik	Sebagai tempat pertemuan nelayan
6.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	2 Unit	Kondisi Baik	Sebagai tempat pembuangan sampah

Sumber: *subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011*

Beberapa fasilitas fungsional yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan seperti disebutkan tabel 3 di atas sebagai berikut:

a.3.1 Pos Jaga

Pelabuhan Perikanan Pantai (Mayangan) memiliki pos tempat petugas keamanan berjaga di lingkungan pelabuhan perikanan. Pos jaga ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk pelabuhan. Pos jaga yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2008 yang merupakan bangunan permanen namun. Kondisi dari bangunan pos jaga ini kurang baik, bangunan ini memiliki luas 9m². Pos jaga digunakan sebagai tempat penarikan retribusi atau pemungutan uang pas masuk pelabuhan dan pos keamanan di lingkungan pelabuhan.

a.3.2MCK

Kamar mandi (MCK) di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dibangun pada tahun 2007. Kamar mandi (MCK) seluas 18m^2 yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan ini dalam kondisi kurang baik dikarenakan target pembangunan dari kamar mandi (MCK) ini adalah seluas 36m^2 . Kamar mandi (MCK) ini digunakan sebagai sarana mandi, cuci dan kakus yang ada di lingkungan pelabuhan.

a.3.3Kios/Toko/Warung

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki 28 unit kios/toko/warung dengan luas 30m^2 yang dibangun pada tahun 2009. Bangunan ini merupakan bangunan permanen dengan kondisi yang baik. Kios/toko/warung ini menjual bahan-bahan kebutuhan pokok di lingkungan pelabuhan.

a.3.4Musholla



Gambar 12. Musholla

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Masyarakat nelayan kota Probolinggo mayoritas adalah muslim, sehingga kehadiran suatu tempat ibadah berupa musholla merupakan suatu

kebutuhan pokok. Oleh sebab itu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan menyediakan fasilitas berupa musholla dilingkungan pelabuhan.

a.3.5 Gedung Pertemuan Nelayan



Gambar13. Gedung pertemuan

Sumber: subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan memiliki gedung pertemuan nelayan dengan luas 300m² yang selesai dibangun pada tahun 2008. Kondisi dari bangunan ini baik dan merupakan bangunan permanen. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pertemuan para nelayan, selain itu digunakan sebagai tempat penyuluhan kepada nelayan yang dilakukan oleh pihak Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Rencana pengembangan usaha dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan ini akan menggunakan (menyewakan) bangunan ini sebagai gedung serba guna yang dapat digunakan.

a.3.6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan direncanakan dengan harapan menjadi pelabuhan perikanan yang bersih, teratur dan Nyman. Oleh sebab itu segala macam sampah-sampah harus dikumpulkan pada satu lokasi tertentu, yaitu di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang lokasinya disebelah belakang tempat penjemuran jala. *(Sumber: Sub bag Tata Usaha UPT Mayangan kota Probolinggo tahun 2011)*

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diberikan oleh Sub bag tata usaha Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, pemerintah telah berperan serta memberikan berbagai macam fasilitas yang lengkap dan memadai untuk segala macam aktifitas pelayanan operasional pelabuhan perikanan di Kota Probolinggo.

b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan pada sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tugas PPP Mayangan salah satunya adalah pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan. Pengendalian tersebut dilakukan dengan perizinan kesyahbandaran atau izin yang diberikan untuk melaut dan bersandar dengan Surat Ijin Berlayar (SIB) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Perizinan tersebut berkaitan dengan ijin berlayar dan alat tangkap yang digunakan dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayaran.

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengendalikan agar penangkapan yang dilakukan oleh nelayan sesuai aturan dan tidak merusak sumber daya laut karena menangkap ikan yang berlebihan dan juga merusak lingkungan.

“setiap hari banyak nelayan mengurus surat ijin berlayar dan surat ijin penangkapan ikan guna kelancaran dalam berlayar dan menangkap ikan dilaut, sehingga ketika ada pemeriksaan dari polisi air nelayan dapat menunjukkan surat ijin tersebut”
(Wawancara tanggal, 14September 2015 di kantor UPT Probolinggo.)

Selain itu, kita juga memberikan sosialisasi yang rutin, sehingga nelayan tahu dan paham tentang penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagai berikut:

“dalam proses perijinan berlayar dan menangkap ikan para nelayan selalu dihimbau untuk menangkap ikan dengan peralatan yang dianjurkan agar tidak merusak ekosistem laut. bahkan para nelayan setiap ada peraturan baru ataupun bantuan modal sering kita kumpulkan untuk sosialisasi agar dekat dengan nelayan”
(Wawancara tanggal, 14September 2015 di kantor UPT Probolinggo.)

Untuk melakukan pelayaran harus memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan dari PPP Mayangan, jadi kita harus mengurusnya di UPT PPP Mayangan pernyataan mamed nelayan di Pelabuhan Mayangan berikut .

“setiap akan berlayar di lautan untuk menangkap ikan kita memang diharuskan untuk memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan yang administrasinya harus ke dinas kelautan dan perikanan provinsi Jawa timur kemudian dilanjutkan ke syahbandar di PPP Mayangan Kota Probolinggo”
(Wawancara tanggal, 17September 2015 di TPI Probolinggo.)

Berikut ini data Syahbandar di PPP Mayangan kota probolinggo, sepanjang tahun 2013 terdapat 369 unit kapal ikan yang beroperasi di PPP Mayangan. Ukuran kapal yang masuk ke PPP Mayangan bervariasi mulai dari dibawah 19 GT hingga yang lebih dari 3000 GT. Alat tangkap yang digunakan kapal-kapal tersebut juga bervariasi, secara umum ada 7 jenis alat penangkap ikan ditambah 1 jenis kapal pengangkut di PPP Mayangan. Data selengkapnya mengenai jumlah armada beserta alat tangkap yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Data Armada Kapal Perikanan beserta Alat Tangkap yang digunakan PPP Mayangan- Kota Probolinggo Tahun 2013

Alat Tangkap	<10 GT	11-20 GT	21-30 GT	31-50 GT	50-100 GT	>100 GT	JUMLAH
Bouke Ami	0	0	0	1	1	0	2
Bubu	0	0	2	1	0	0	3
Cantrang	30	84	60	0	0	0	174
Gill Net	3	1	1	11	1	1	18
Payang	2	1	6	0	0	0	9
Purse Seine	17	37	7	0	0	0	61
Rawai Dasar	0	1	11	67	7	0	86
Pengangkut	0	0	0	1	7	8	16
JUMLAH	52	124	87	81	16	9	369

Sumber : data Syahbandar PPP Mayangan 2013

Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa mayoritas kapal berukuran 11-30 GT paling banyak menggunakan alat tangkap jenis cantrang, sedangkan kapal berukuran 31-50 GT didominasi alat tangkap rawai dasar. Hal tersebut berpengaruh pada lama operasi di laut serta wilayah operasionalnya, kapal cantrang memiliki lama hari operasional antara 1-3 hari dengan wilayah operasional di sekitar Selat Madura dan Laut Jawa, sedangkan lama hari operasi kapal rawai dapat mencapai diatas 100 hari dengan wilayah tangkapan di daerah perairan Indonesia Timur seperti Laut Aru, Laut Avona, Laut Timor dan sekitarnya. Kapal-kapal ukura diatas 30 GT ini mayoritas juga memiliki pelabuhan bongkar/muat/penghubung di sekitar daerah operasionalnya sehingga memungkinkan untuk melakukan transshipment maupun suplai logistic dengan kapal pengangkut dari satu keagenen. Keberadaan kapal pengangkut ini dapat meminimalisir jumlah trip yang dilakukan kapal penangkap ikan yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya operasional. Kapal penangkap ikan tersebut

hanya kembali ke pelabuhan pangkapan (PPP Mayangan) setidaknya satu kali dalam satu tahun untuk pengecekan fisik dan dokumen rutin

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Armada Kapal Perikanan PPP Mayangan – kota Probolinggo Tahun 2011-2013

Ukuran	2011	2012	2013
< 10 GT	78	77	52
11-20 GT	43	79	124
21-30 GT	65	102	87
31-50 GT	39	77	81
51-100 GT	8	17	16
> 100 GT	2	6	9

Sumber : data Syahbandar PPP Mayangan 2013

Tabel 6. Perbandingan Jumlah Alat Tangkap Ikan PPP Mayangan – kota Probolinggo Tahun 2011-2013

Ukuran	2011	2012	2013
Bouke Ami	0	1	2
Bubu	8	3	3
Cantrang	119	155	174
Gill Net	8	15	18
Muro Ami	0	1	0
Pancing Cumi	0	1	0
Payang	24	17	9
Purse Seine	17	60	61
Pancing Rawai	49	93	85
Pengangkut	10	12	16

Sumber : data Syahbandar PPP Mayangan tahun 2013

Dari tabel perbandingan 5 dan 6 di atas, terlihat bahwa peningkatan armada terjadi pada kapal berukuran 11-20 GT, 31-50 GT serta diatas 100 GT, sedangkan armada ukuran lain justru mengalami penurunan kuantitas. Demikian juga pada alat tangkap yang digunakan, peningkatan terjadi pada alat tangkap jenis cantrang, gill net, purse seine serta kapal pengangkut, untuk alat tangkap jenis lain centreng mengalami penurunan jumlah dan stagnan.

Jika diamati peningkatan terbesar terjadi pada kapal berukuran 10-20 GT dengan alat tangkap cantrang, hal tersebut mengindikasikan bahwa kapal dengan

ukuran dan alat tangkap tersebut sangat diminati oleh pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Probolinggo, sehingga beresiko untuk menyebabkan terjadinya overfishing di kawasan Selat Madura dan Laut Jawa. Untuk itu perlu dilakukan langkah yang tepat guna mengantisipasi terjadinya hal tersebut.

Data produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di Tempat pelelangan Ikan Mayangan Kota Probolinggo sepanjang Tahun 2013 mencapai 12.698.417 Kg, angka ini jauh diatas hasil produksi tahun 2012 yang hanya sekitar 9.500 ton atau meningkat sebesar 33,58 %. Untuk lebih jelasnya, hasil perbandingan hasil produksi tangkapan ikan yang didaratkan di PPP Mayangan antara tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 7. Perbandingan Jumlah Hasil Produksi Tangkapan Ikan PPP Mayangan – kota Probolinggo Tahun 2011-213

Bulan	Produksi 2011 (Kg)	Produksi 2012 (Kg)	Produksi 2013 (Kg)
Januari	733.456	904.360	1.138.611
Februari	667.441	926.181	1.062.177
Maret	689.944	869.495	1.477.992
April	497.120	989.905	1.372.253
Mei	1.693.594	933.616	1.202.689
Juni	1.321.344	656.504	1.160.703
Juli	1.089.107	478.412	816.894
Agustus	488.278	442.398	409.923
September	517.797	503.213	557.630
Oktober	603.474	677.351	647.864
November	1.023.185	862.354	1.008.323
Desember	1.086.487	1.262.117	1.843.358
Total	11.411.227	9.505.906	12.698.417

Sumber : data Syahbandar PPP Mayangan 2013

Berdasarkan tabel 7. di atas terlihat tren hasil produksi selama tiga tahun cenderung stabil dengan membentuk pola sinusoidal. Akan tetapi nilai puncak justru mengalami pergeseran, dari tahun 2011 yang terjadi di Bulan Mei, sedangkan tahun 2012 dan 2013 justru terjadi di Bulan Desember.

Jika hasil produksi tahun 2013 diperjelas dengan membagi jenis kapal berdasarkan alat tangkap yang digunakan (diambil 3 jenis utama cantrang, purse seine dan rawai dasar, untuk jenis alat tangkap lainnya dimasukkan kategori cantrang) maka akan terlihat bahwa produksi ikan hasil tangkapan dominan dipengaruhi oleh kapal rawai sedangkan produksi ikan dari kapal cantrang dan purse seine relative stabil sepanjang tahun/ titik terendah hasil produksi kapal rawai terdapat pada bulan Februari dan Agustus, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adanya edaran prakiraan cuaca buruk pada bulan Januari 2013 dan Januari 2014 yang dilansir oleh BMKG sehingga mayoritas kapal cenderung untuk masuk ke pelabuhan dan menurunkan muatan ikan hasil tangkapannya pada bulan Desember. Selain itu pada bulan Februari dan Agustus terdapa dua hari besar keagamaan yang diikuti oleh mayoritas awak kapal (Imlek dan Idul Fitri) sehingga kapal baru saja berlayar menuju fishing ground setelah perayaan hari besar tersebut selesai.

Mayoritas ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPP Mayangan berupa ikan demersal yang banyak hidup di dasar laut berkarang. Dari jenis tersebut yang terbanyak didaratkan oleh kapal berukuran > 30 GT adalah ikan dari genus *Lutjanus* (kakap), *Epinephelus* (kerapu), *Caranx* (Putihan) dan lain-lain. Sedangkan kapal berukuran < 30 GT mayoritas mendarat ikan dari genus *Leiognatus* (peperak), *Namipterus* (kurisi) serta *Decopterus* (laying) dan lain-lain.

“Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2014. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2014 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur”
(Wawancara tanggal 21 September 2015, di DKP Provinsi Jawa Timur)

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Siswanto selaku sub bag sarana prasarana pelabuhan DKP Provinsi Jawa Timur. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2014	Realisasi			Capaian Th 2014 (%)
			Th 2012	Th 2013	Th 2014	
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Th 2012	Th 2013	Th 2014	Capaian
1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	2,0	1,5	3,47	1,0	54,50
	2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	0	9	7,19	9	67,70
2. Meningkatnya prodperikanan dan kelautan yang bermutu	3. Persentase peningkatan produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu (%)	6,6	10,2	2,57	4,5	64,20
	4. Persent	6	1		1	
3. Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir		5,0	21,6	0,038	3,2	155,00
		0	8	0,002	1	100,00
		0,0	0,0		0,06	

Sumber : data Sub bag tata usaha UPT Mayangan tahun 2014

berdasarkan Tabel 8 diatas bahwa sasaran kinerja yang ditargetkan di berikan poin-poin, ada 4 indikator di dalamnya, dan ada 3 sasaran yang ingin di capai. Sejak tahun 2012 hingga 2014 capaian selalu diatas target disetiap indikatornya dan selalu tepat sasaran pula.

Dari hasil wawancara dan berbagai macam tabel yang bersumber dari UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan bahwa pengendalian dan pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem perikanan secara legal dan meningkatkan ketertiban administrasi berlayar, hal tersebut mengacu pada tujuan pelabuhan dalam mendukung upaya pemberantasan usaha penangkapan ikan yang *illegal*, tidak tercatat dan tidak sesuai aturan.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo

Pelabuhan Mayangan dibangun dengan tujuan awal untuk menampung dan melayani aktifitas perekonomian berbasis perikanan yang dilakukan oleh nelayan dengan sasaran yang akan dicapai salah satunya yaitu meningkatkan fasilitas pelabuhan sesuai dengan *masterplan*. Dalam pembangunannya pelabuhan mayangan dibangun bukan tanpa halangan, anggaran pembangunan yang kurang karena dibangun secara bertahap dengan dana gabungan dari APBN dan pinjaman dana dari luar negeri, rekonstruksi sarana prasarana dan fasilitas, belum adanya kerjasama dengan instansi terkait oprasional pelabuhan serta belum maksimalnya peran serta masyarakat sebagai pengguna jasa pelabuhan dalam meningkatkan kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo. Berikut peneliti jelaskan faktor penghambat dari diskusi dengan masyarakat pengguna jasa pelabuhan dan UPT PPP Mayangan yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan yaitu:

a. Kualitas perawatan yang kurang

Pada dasarnya fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sudah cukup lengkap, namun saat ini ada beberapa fasilitas yang sudah mulai rusak. Hal ini dikarenakan operasional pelabuhan kekurangan anggaran perawatan, karena dalam perawatan fasilitas pelabuhan menunggu dana dari dinas perikanan provinsi Jawa timur sebagai pengambil kebijakan. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara dengan Nonot Wijayanto selaku kepala UPT PPP Mayangan,

“memang pelaksanaan proses pengembangan pelabuhan perikanan pantai mayangan kota Probolinggo ini tidak bisa maksimal karena dana dari APBD Provinsi Jawa harus dibagi ke beberapa pelabuhan di Jawa timur yang juga mulai dikembangkan sehingga pembangunan di sini sedikit terhambat”

(Wawancara tanggal, 14 September 2015 di kantor UPT Probolinggo.)

Nelayan setempat juga mengeluhkan ada beberapa fasilitas yang mulai tidak terawat, seperti salur irigasi, kantor kredit usaha rakyat, tempat penyimpanan ikan, tempat parkir, dan lain lain itu harusnya tanggung jawab PPP Mayangan untuk merawat dan menjaga fasilitas yang telah dibangun,

“untuk fasilitas dari pelabuhan alhamdulillah pemerintah sudah menyediakan dengan lengkap namun banyak bangunan yang sudah dibangun tapi kurang perawatan, susunan bangunan yang tidak tertata letaknya, dan masih banyak sampah yang berserakan bahkan saluran irigasi pelabuhan banyak sampah yang tergenang sehingga air irigasi tersebut tidak mengalir”

(Wawancara tanggal, 17 September 2015 di kantor TPI Probolinggo.)



Gambar 14 Saluran irigasi pelabuhan

Sumber: Data Primer hasil observasi peneliti tahun 2015

Gambar 14 tersebut adalah gambar saluran irigasi yang tidak terawat, banyak sampah di saluran irigasi tersebut sehingga mengakibatkan air irigasi tidak mengalir



Gambar15.pos pengawasan pelabuhan

Sumber: Data Primer hasil observasi peneliti tahun 2015



Gambar16. Kantor unit kredit rakyat

Sumber: Data Primer hasil observasi peneliti tahun 2015



Gambar17 tempat parkir pelabuhan

Sumber: Data Primer hasil observasi peneliti tahun 2015

Pada gambar 15, 16 dan 17 tersebut sudah terlihat bahwa pembangunan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah tidak dirawat dengan baik, pada gambar 15 pos penjagaan yang seharusnya digunakan untuk menjaga ketertiban pelabuhan malah tidak terawat sejak dibangun, begitu juga dengan gambar 16 dan gambar 17, kantor unit kredit rakyat yang akan digunakan untuk simpan pinjam

nelayan dan tempat parkir pelabuhan belum digunakan sejak dibangun sehingga banyak rumput yang menutupi bangunan dan karat pada pagar bangunan tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan masih terdapat fasilitas pelabuhan yang belum dijalankan secara maksimal sesuai tugasnya seperti pos penjagaan pelabuhan, tempat parkir pelabuhan yang terbengkalai, kantor unit simpan pinjam pelabuhan, dan drainase saluran air yang tergenang kotoran. Dalam hal ini pemerintah seharusnya meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait yang sudah tercantum dalam visinya yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima dan koordinasi dalam tugas operasional pelabuhan

b. Kurang tepatnya sarana yang ada

Selain ada beberapa sarana yang rusak, juga ada beberapa sarana yang menurut nelayan sebagai pengguna jasa kurang sesuai dengan tujuan awalnya. Misalnya saja kolam, kolam tersebut memang dibutuhkan, namun dengan bibir yang menghadap langsung ke laut malah membuat kapal kita yang bersandar terkena gelombang besar saat musim angin. Pernyataan tersebut dikatakan oleh mamed nelayan yang menggunakan fasilitas pelabuhan sejak di pelabuhan lama.

“seharusnya pemerintah membangun kolam labuh pelabuhan seperti di pelabuhan lama, yaitu pelabuhan tanjung tembaga karena di pelabuhan tanjung tembaga kolam labuh memanjang dan di kanan – kirinya terhalang bangunan, sehingga ketika musim angin tidak mengganggu kapal yang berlabuh. Berbeda dengan kolam labuh yang baru di pelabuhan mayangan”
(Wawancara tanggal, 17September 2015 di kantor TPI Probolinggo.)



Gambar18 kolam labuh pelabuhan

Sumber: Subbag TU UPT PPP Mayangan tahun 2011

Gambar 18 tersebut adalah design pelabuhan dari atas yang banyak dikeluhkan oleh nelayan karena kolam yang luas dan bibir kolam yang menghadap langsung ke arah lautan. Pada saat musim angin gending, ikan hasil tangkapan nelayan di kota dan kabupaten Probolinggo beberapa waktu terakhir menurun sekitar 50 persen karena angin gending tersebut memiliki hembusan kuat dan bersifat panas Serta kering

“angin gending mengakibatkan ikan ikan menjauh dari perairan Probolinggo dan terpaksa harus melaut ke luar daerah hingga perairan Madura dan Bali. Penurunan hasil tangkap sekitar 50 persen karena apabila sekali berlayar biasanya kami mendapatkan 1 ton ikan, namun sejak sekitar sepekan inihanya mendapat 3 sampai 4 kuintal”, kata mamed nelayan asal Kecamatan mayangan”

(Wawancara dengan mamed nelayan di pelabuhan, 17September 2015)

Menurut dia, gelombang besar sudah terjadi seminggu yang lalu mengakibatkan dirinya beserta nelayan lain memilih menyandarkan kapalnya di bibir pantai karena dengan cuaca yang tidak bersahabat tersebut ia tidak memungkinkan untuk beraktifitas seperti hari biasa. Lebih lanjut nelayan tersebut mengungkapkan hasil tangkapannya tidak bisa menutupi biaya melaut, karena

biaya melaut mereka tidak sebanding. Nelayan tersebut juga mengatakan sejak bulan Mei lalu angin gending mulai berhembus di wilayah Pajajaran dan Tongas di Probolinggo dan diprediksi akan berhembus hingga akhir Desember.

“angin gending berhembus di wilayah Pajajaran dan Tongas, di luar wilayah itu masih belum ada, namun apabila angin gending berhembus sangat besar bisa sampai ke Madura. Sekarang ini memang sudah waktunya ombak mulai tinggi dan di sisi dermaga sifat ombaknya landai sedangkan dari sisi utara sifat ombaknya kencang”
(Wawancara dengan mamed nelayan di pelabuhan, 17 September 2015)

Oleh karena itu, Syahbandar PPP Mayangan Kota Probolinggo, Nonot Wijayanto menghimbau para nelayan mewaspadaai adanya angin gending. Apalagi sifat angin gending ini bersifat panas dan kering sehingga dapat merusak kapal nelayan maupun kegiatan warga di daerah pesisir”, kepala syahbandar tersebut mengatakan para nelayan masih meminta surat ijin berlayar guna mencari ikan meskipun ikan di laut berkurang akibat perubahan cuaca tersebut. Namun, dari data yang dimilikinya hembusan angin gending tersebut tidak sampai mengurangi jumlah kapal yang berlayar secara signifikan.

“ada sekitar 50 nelayan yang datang untuk meminta surat ijin persetujuan berlayar (SPB), namun sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi status awas dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)”
(wawancara tanggal 21 September 2015 di UPT Probolinggo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kolam labuh Pelabuhan Mayangan terlalu luas dan tidak ada bangunan pelindung untuk melindungi kapal nelayan dari angin gending yang selalu merusak kapal sehingga ketika musim angin gending nelayan menitipkan kapalnya di pelabuhan lama karena kolam labuh pelabuhan tidak aman, seharusnya dalam setiap pembangunannya pemerintah melibatkan berbagai macam stakeholder agar pembangunan

berkelanjutan pelabuhan dapat terwujud

c. Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna jasa

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut

Pembangunan Kelautan dan Perikanan memiliki karakteristik yang sarat akan nuansa ekologis, ekonomi, teknologi dan social budaya. Oleh sebab itu, pembangunan sektor ini harus memperhatikan keseimbangan karakteristik tersebut. Menyikapi hal ini, identifikasi isu-isu strategis seperti isu sosial budaya, isu lingkungan dan isu pembangunan ekonomi masyarakat perlu dilakukan penentu kebijakan. Isu social budaya antara lain mengemukakan rendahnya kualitas sumberdaya manusia pesisir, dan rendahnya semangat kebaharian masyarakat. Sementara isu lingkungan dewasa ini lebih kepada degradasi lingkungan akibat dampak kegiatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan. Sementara isu yang paling strategis dewasa ini adalah isu pembangunan ekonomi masyarakat pesisir yang dianggap belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat pesisir sejajar dengan elemen masyarakat lainnya. Hal ini diidentifikasi sebagai imbas dari belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta kurangnya dukungan infrastruktur. Isu-isu strategis tersebut harus mampu dijawab dengan intervensi pemerintah (pemda) melalui langkah dan kebijakan yang konkrit, terpadu, berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat pesisir.

Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna jasa dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan pantai mayangan di sini masih rendah. adanya pengguna jasa yang kurang disiplin dalam

membayar retribusi di pelabuhan karena merasa penduduk sekitar pelabuhan, kurang tertibnya pengguna jasa dalam membuang sampah disembarang tempat. Masyarakat pengguna jasa pelabuhan yang dimaksud di sini adalah nelayan, pedagang ikan, masyarakat umum dll, seperti yang diungkapkan oleh pak mamed nelayan di pelabuhan tersebut “memang saya akui bahwa masyarakat disekitar pelabuhan sudah menganggap pelabuhan sudah seperti rumah sendiri, mereka masuk pelabuhan tanpa membayar retribusi walaupun hanya Rp1000,- akan tetapi untuk banyaknya sampah di pelabuhan pemerintah belum menyiapkan tempat sampah yang memadai, jadi kebanyakan pengguna jasa membuang sampah secara sembarangan”

Di sisi lain kepala PPP Mayangan Nonot Wijayanto membantah terhadap anggapan nelayan bahwa pemerintah kurang menyiapkan tempat sampah yang memadai

“Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan sejak awal sudah diharapkan menjadi pelabuhan yang bersih, teratur dan nyaman. Oleh sebab itu semua sampah dikumpulkan menjadi satu lokasi tertentu, yaitu di Tempat Pembuangan sampah (TPS) yang lokasinya di belakang tempat penjemuran jalan, apabila masih banyak sampah yang berserakan tersebut diakibatkan oleh kurang tertib dan kurang kesadaranny para pengguna jasa”

(wawancara tanggal 21 September 2015 di UPT Probolinggo)



Gambar 19 area penyimpanan jaring dan keranjang
Sumber: Data Primer hasil observasi peneliti tahun 2015

Gambar 19 tersebut menunjukkan bahwa kurang sadarnya pengguna jasa dari pedagang ikan yang membiarkan keranjang ikan berserakan dan banyak sampah plastik di sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti perlu adanya peran serta masyarakat pengguna jasa pelabuhan dalam menunjang segala kegiatan pelabuhan perikanan dalam hal ini turut serta membayar retribusi, menjaga fasilitas dan kebersihan pelabuhan, serta segala aturan yang ditentukan oleh pelabuhan tersebut

C. Pembahasan

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo.

a. Penyedia Sarana Fasilitas

Fasilitas yang disediakan oleh PPP Mayangan Probolinggo sangat banyak dan lengkap. Kelengkapan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dari nelayan

untuk menangkap ikan dan transaksi penjualan ikan. mulai dari Fasilitas pokok yang merupakan sarana dalam penyelenggaraan dan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang difungsikan dalam penyelenggaraan operasional pelabuhan, yang mana keberadaan fasilitas ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat nelayan dan pengguna jasa pelabuhan lainnya yang memanfaatkan pelayanan pelabuhan, dan yang terakhir fasilitas penunjang yang merupakan sarana pelengkap dalam mendukung keberadaan penggunaan dari fasilitas pokok dan fasilitas fungsional. Seluruh sarana fasilitas pelabuhan tersebut sudah diatur oleh pemerintah untuk membantu nelayan dan pengguna jasa yang lain dalam kegiatan menangkap ikan ataupun pelelangan ikan serta menjaga ketertiban di laut ataupun di pelabuhan.

Dalam melaksanakan pelayanan prima oleh pemerintah terhadap pengguna jasa dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Penataan pelayanan pengurusan dokumen yaitu meningkatkan kenyamanan pengguna jasa dalam pengurusan dokumen Kesyahbandaraan.
2. Penambahan fasilitas pendukung keamanan yaitu menjamin keamanan pengguna jasa.
3. Penataan manajemen penanganan sampah yaitu meningkatkan nilai kebersihan lingkungan.
4. Penanganan limbah kapal yaitu mencegah pencemaran lingkungan laut area pelabuhan.
5. Penataan PKL yaitu menata ketertiban pengunjung dan kegiatan Non Perikanan.

6. Penambahan sarana pemadam kebakaran (Hidrants) yaitu mengantisipasi kecelakaan kerja.

Peran pemerintah sebagai penyedia sarana fasilitas terbaru yang dibutuhkan dalam operasional pelabuhan sudah sesuai pendapat dari Siagian(2006;142-149)dimana peran pemerintah sebagai modernisator melalui pembangunan setiap negara yang menginginkan menjadi negara yang modern. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, pemberdayaan rakyat, kesediaan mengambil resiko, orientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menuntun masyarakatnya ke arah kehidupan modern seperti itu. Dengan peran tersebut, PPP Mayangan sebagai wakil dari pemerintah provinsi Jawa timur dalam pengelolaan pelabuhan memang sudah seharusnya menyediakan fasilitas modern yang dibutuhkan dalam operasional pelabuhan untuk pengembangan pembangunan berkelanjutan pelabuhan.

Pelabuhan PPP Mayangan dalam pengembangan pelabuhan tersebut sudah diatur menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10 / MEN / 2004 tentang pelabuhan perikanan pada ketentuan umum pasal 1, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan berbagai

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Keputusan menteri kelautan dan perikanan tersebut sudah di laksanakan dengan baik oleh PPP Mayangan dengan menyiapkan segala fasilitas pokok, fungsional dan penunjang operasional pelabuhan.

b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan pada sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Salah satu tugas pokok pelabuhan mayangan melalui syahbandar yaitu pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan. setiap akan berlayar dan menangkap ikan nelayan seharusnya sudah mengurus Surat Ijin Berlayar (SIB) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Dari data syahbandar sudah terlihat jumlah kapal, hasil tangkapan ikan dan alat tangkap apa saja yang digunakan. Pihak pelabuhan sendiri sudah semestinya melakukan sosialisasi mengenai dokumen kapal dan alat tangkap yang sah dan baik dalam menangkap untuk tindakan *preventif* dalam kegiatan *illegal fishing*

Pemerintah daerah selaku salah satu *stakeholders* dalam setiap tahap kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Dalam Fauzi dkk (2001: h.4) diuraikan pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang lingkungan hidup memiliki beberapa pengertian yaitu:

- f. Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan ekosistem setempat
- g. Menghormati kearifan tradisional lokal yang sudah dikembangkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari.

- h. Tidak berdasarkan batas administratif tetapi berdasarkan batas ekologi (*bioregion*)
- i. Meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan setempat dan bukan menghancurkan daya dukung ekosistem dengan eksploitasi yang melebihi daya dukung.
- j. Pelibatan secara aktif masyarakat adat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan (menentukan) dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Edith Brown Weiss menyebutkan bahwa makna yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah setiap generasi umat manusia di dunia mempunyai hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Ada tiga dasar yang terkandung dalam prinsip keadilan antar generasi yaitu :

- a. Setiap generasi harus melakukan konservasi keragaman sumber daya lingkungan, agar generasi mendatang memiliki pilihan yang sama banyaknya dengan generasi sekarang dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan ;
- b. Setiap generasi harus menjaga atau memelihara kualitas lingkungan agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan dengan kualitas yang sama, sebagaimana yang dinikmati generasi sebelumnya.
- c. Setiap generasi yang menjamin hak akses yang sama terhadap segala warisan kekayaan alam dari generasi sebelumnya dan harus melindungi akses ini untuk generasi mendatang.

Dalam pelaksanaannya pengendalian pelabuhan ini menurut Mulyadi (2008) yaitu menjaga kekayaan harta milik perusahaan dan catatan organisasi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian pelabuhan juga sama yaitu agar sumber daya alam yang dikelola bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku maka dilakukanlah pengawasan untuk pengelolaan tersebut. Sedangkan pengawasan pada sumberdaya kelautan dan perikanan ini sesuai dengan pendapat Ardianto dkk (2004) yaitu pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan, sedangkan menurut Basu Swasta yang mana ia menjelaskan bahwa pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Hasil yang diinginkan pelabuhan PPP Mayangan dalam hal ini yaitu meningkatkan mutu dan kualitas hasil perikanan, meningkatkan fasilitas pelabuhan sesuai dengan *masterplan*, mendukung upaya pemberantasan usaha penangkapan ikan secara ilegal, tidak tercatat dan tidak sesuai aturan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan merupakan hal penting dalam perencanaan manajerial pelabuhan.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo

Permasalahan pembangunan kita terjadi karena hegemoni pemikiran pembangunan dan kebijakan yang sentralistis Menurut Affendi Anwar (2001), Disamping itu strategi pembangunan tersebut terlalu menekankan kepada akumulasi kapital fisik, yang mengabaikan keterkaitannya dengan kapital-kapital lain seperti kapital alami, kapital manusia dan kapital sosial. Kebijakan yang salah arah (*misleading policies*) ini tercermin sebagai keuntungan yang diperoleh kota-kota besar, terutama yang berlokasi di Pulau Jawa, mengalami transfer sumberdaya interregional, merupakan penerima manfaat dari sistem pemerintahan Indonesia yang sentralistik

Riyadi dan Dedi,S (2005) menambahkan ancaman terhadap kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup disebabkan salah urus dalam pengelolaan ekonomi baik dimasa lalu maupun sampai sekarang, yang bersumber dari kesalahan konsepsinya maupun dalam organisasi pelaksana programnya.

Sedangkan jika ditinjau dari permasalahan, kenapa lambat bahkan stagnan/terhentinya pembangunan pelabuhan menurut penulis yang telah didiskusikan dengan masyarakat setempat dan dari Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Kualitas perawatan yang kurang

Kualitas perawatan yang kurang ini berhubungan dengan bangunan yang sudah dibangun oleh pemerintah akan tetapi tidak dimanfaatkan sesuai rencana,

selain itu juga ada beberapa komponen bangunan yang rusak tidak mendapat perhatian dari pengelola. Pihak PPP Mayangan tidak mau disalahkan dengan masalah ini, karena mereka sendiri terbatas pada anggaran dan sumber daya manusia. Pada kondisi lapangan, sampai saat ini masih belum banyak hal yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam mengatasi masalah ini. Bintoro Tjokroaminoto (1994: h.9-10) menyimpulkan ciri-ciri dari administrasi pembangunan diantaranya:

1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang.
2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya yang efektif.
3. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa yang akan datang.
4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah.
5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang.
6. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparaturn pemerintah juga bisa sebagai penggerak perubahan (*agents of change*).

7. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Banyaknya bangunan yang dibangun seharusnya sudah sesuai dengan sumber daya manusia yang akan dibangun untuk mengelolanya, hal ini sesuai pendapat Kramadibrata (1985) untuk mencapai hasil maksimal maka perencanaan dan perancangannya dalam masalah operasional meliputi penilaian terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas pelabuhan (alur pelayaran, kolam pelabuhan, tambatan, gudang, jalan) diharapkan dapat berfungsi secara maksimal (dalam hal ini pendayagunaan) sehingga kelancaran arus barang, lalu lintas kapal dan kegiatan lain dapat berimbang terhadap ukuran hasil kerja yang disyaratkan.

b. Kurang tepatnya sarana yang ada

Ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat nelayan. Ketidaksesuaian ini contohnya ada pada kolam labuh kapal yang terlalu luas dan bibir kolam yang menghadap ke laut. Kondisi ini tidak seperti yang nelayan harapkan, karena dengan fasilitas tersebut ketika musim angin gending berakibat gelombang tinggi dan juga kapal yang berlabuh di dermaga akan bertabrakan. Dalam kasus ini ketika musim angin dan terjadi ombak tinggi yang masuk kolam labuh nelayan memilih melabuhkan kapal mereka ke pelabuhan lama, yaitu pelabuhan tanjung tembaga. Untuk mengatasi masalah ini PPP Mayangan akan melebarkan dan meninggikan dinding kolam sehingga mampu memecah gelombang dengan baik.

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan sebagai salah satu *stakeholder* dalam setiap kebijakannya harus mampu mengakomodasikan keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lokal. Fauzi (2001;4) dalam pendapatnya pemerintah daerah harus melibatkan secara aktif masyarakat adat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkementingan (menentukan) dalam membuat kebijakan, melaksanakan, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam pembangunannya pelabuhan mayangan seharusnya melibatkan masyarakat pengguna jasa tersebut sehingga pembangunan pelabuhan sesuai yang diharapkan seperti masalah teknis meliputi pemilihan letak ditinjau terhadap gangguan alam, teknis konstruksi (mekanika tanah, pondasi, mekanika teknik, beton atau baja atau kayu teknik lalu lintas), pelaksanaan pada saat pembangunan (*network planning*), ukuran perkiraan kolam labuh kapal dan jenis kapal yang ditampung di pelabuhan.

c. Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna jasa

Kepedulian masyarakat nelayan pada PPP Mayangan masih rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan beranggapan bahwa PPP Mayangan disediakan untuk mereka. Petugas yang ada di PPP Mayangan dianggap masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang masuk ke PPP Mayangan jarang ada yang mau membayar retribusi. Selain itu, mereka meletakkan barangnya secara sembarangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan ketertiban dan kebersihan PPP Mayangan.

Dalam pelaksanaannya pembangunan pelabuhan ini seharusnya dapat berjalan dengan lancar dan baik karena fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah sudah maksimal. Kaho (1997;66-69) juga mengungkapkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang sehat dan baik akan berjalan lancar apabila manusia pelaksanaanya baik. Dalam posisi ini manusia sangat penting karena manusia merupakan unsur dinamis dalam operasional organisasi yang bertindak roda perusahaan. Begitu juga dengan pendapat Todaro (2000;21) paling tidak ada tiga komponen yang dijadikan dasar untuk memahami pembangunan yang hakiki yaitu: (a) Kecukupan (*sustenance*) yaitu terpenuhinya semua hal yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia yang meliputi pangan, sandang, papan kesehatan dan keamanan. (b) Jati diri (*Self Esteem*) yaitu adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa diri pantas dan layak untuk mengejar atau melaksanakan sesuatu dan sebagainya. (c) kebebasan (*freedom*) yaitu kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-spek materiil dalam kehidupan. Untuk melibatkan itu semua penduduk asli setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan pembangunan pelabuhan serta lingkungan setempat karena pemahaman pembangunan tradisional mereka. Pemerintah harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya, dan keinginan penduduk setempat serta memaksimalkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan gambaran dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan kesimpulan peneliti yaitu:

1. Pemerintah provinsi jawa timur, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini membentuk UPT PPP Mayangan Kota Probolinggo sebagai pelaksana, telah berperan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor pelabuhan dalam pengembangan PPP Mayangan di kota Probolinggo dengan :
 - a. memberikan fasilitas pokok, fasilitas penunjang, dan fasilitas fungsional yang dibutuhkan oleh para nelayan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam operasional di lingkup PPP Mayangan Kota Probolinggo.
 - b. Melakukan pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan melalui pelaksanaan perijinan berlayar (SIB) dan perijinan penangkapan ikan (SIPI), dengan membentuk seksi Kesyahbandaran sebagai seksi yang berwenang
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sector pelabuhan, yaitu:

- a. Belum lengkapnya instansi yang ada serta kurangnya sumber daya manusia yang bertugas dalam perawatan fasilitas PPP Mayangan Kota Probolinggo sehingga banyak bangunan fasilitas yang tidak terawat dengan baik atau bahkan terbengkalai
- b. Terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan nelayan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah, sehingga penggunaan beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia menjadi tidak maksimal.
- c. Tingkat pemahaman masyarakat pelaku perikanan yang masih rendah terhadap kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan seperti halnya dokumen kapal dll, selain itu. Kurangnya kepedulian pengguna jasa yaitu pedagang, nelayan dan masyarakat yang seringkali tidak membayar biaya retribusi masuk PPP Mayangan, serta meninggalkan sampah yang berserakan baik di area pelelangan ikan maupun di area *breakwater* yaitu tempat yang sering dikunjungi masyarakat umum

B. Saran

Saran adalah masukan pada temuan lapangan yang sudah disimpulkan dan disesuaikan dengan teori dan kemungkinan yang dapat dilakukan, maka dari kesimpulan tersebut dapat dibuat saran untuk UPT PPP Mayangan kedepannya sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait yang lebih baik agar pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan sesuai dengan yang tercantum didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor. PER.06/MEN/2007 jo Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan nomor. PER.19/MEN/2008 tentang organisasi dan tata kerja pelabuhan perikanan yang mengatur tentang fungsi dari pelabuhan perikanan
2. Mempercepat penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana dengan melibatkan swasta dan masyarakat mengacu pada pembangunan berkelanjutan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan agar kegiatan operasional pelabuhan dapat berjalan dengan optimal
3. Perlu adanya peran serta masyarakat pengguna jasa pelabuhan dalam menunjang kegiatan pelabuhan perikanan dengan dipihak pelabuhan menambah sumber daya manusia yang kompeten serta meningkatkan kegiatan sosialisasi segala hal tentang inovasi pelabuhan secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Askar, 2004. Srtategi Pembangunan Berelanjutan. Diakses pada tanggal 20 maret 2013. <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20Abdurrahman.pdf>
- Bratakusumah, Deddy Supriyadi dan Dadang Solihin. 2004. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djajadiningrat, Tjahja. 2005. *Suistanable Futures : Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu*
- Fauzi, Abdullah, dkk. 2001. **Merubah Kebijakan Publik**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hadiwijoyo, S. Suryo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, Abdul. 2004. **Manajemen Keuangan Daerah ; edisi revisi**. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
<http://kkp.go.id/assets/uploads/2015/03/LAKIP-KKP-2014.pdf>
- Kaho, J.R. 1997. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. Jakarta : Rajawali Press
- Mahyudin, B. 2008. Peranan Pelelangan Ikan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (kasus penangkapan ikan di Pelabuhan Ratu). <http://tumoutou.net/> diakses tanggal 3 April 2013
- Martopo dan B Mitchell (ed). 1995. *Bali: Balancing environment, economy and culture, Departement of Geography Publication Series no44*. University of Waterio. Waterioo
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 1992. **Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru**. Diterjemahan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mitchell, Bruce, dkk. 2007. **Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan. Edisi Pertama, Cetakan Ketiga**. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. **Metode Penelitian Kualitaf**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Muluk, M.R. Khairul. 2003. **Desentralisasi (teori, cakupan dan elemen-elemen) dalam jurnal administrasi negara Vol. II, no. 02.** Maret. Malang : FIA UB
- Munandar; editor Yati Sumiharti. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Oentarto, dkk. 2004. **Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan.** Jakarta : Samitra Media Utama
- Resmi, Ajeng Citra. 2011. **Manfaat Pembangunan PPP Mayangan terhadap Peluang Usaha.** Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya
- Riyadi dan Bratakusumah. 2004. **Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Membangun Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.** PTT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Setiadi dkk. 2008. Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang. Riptek, vol.1, No.2, Hal: 1-15, diakses pada tanggal 8 februari 2013 dari http://bappeda.semarang.go.id/uploaded/publikasi/indikator_pembangunan_-_rukuh_dkk.pdf
- Siagian, S.P. 2003. **Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Srateginya Edisi Kedua.** Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2006. **Patologi Birokrasi, Analisis dan Terapinya.** Jakarta : Ghalia
- Suryono. Agus. 2006. **Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspekti Ilmu Sosial.** Malang: UM Press
- Sutinah, Suyanto, dan Bagong. 2010. **Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.** Jakarta: Prenada Media Group
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. **Perencanaan Pembangunan .** Jakarta: Gunung Agung
- _____ 1994. **Pengantar Administrasi Pembangunan.** Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P. 2000. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.** Alih bahasa, Haris
- Triatmono, B. 2002. **Pelabuhan Perikanan.** PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Triyanto, D. 2005. **Bekerja di Kapal.** Mandar Maju. Bandung.

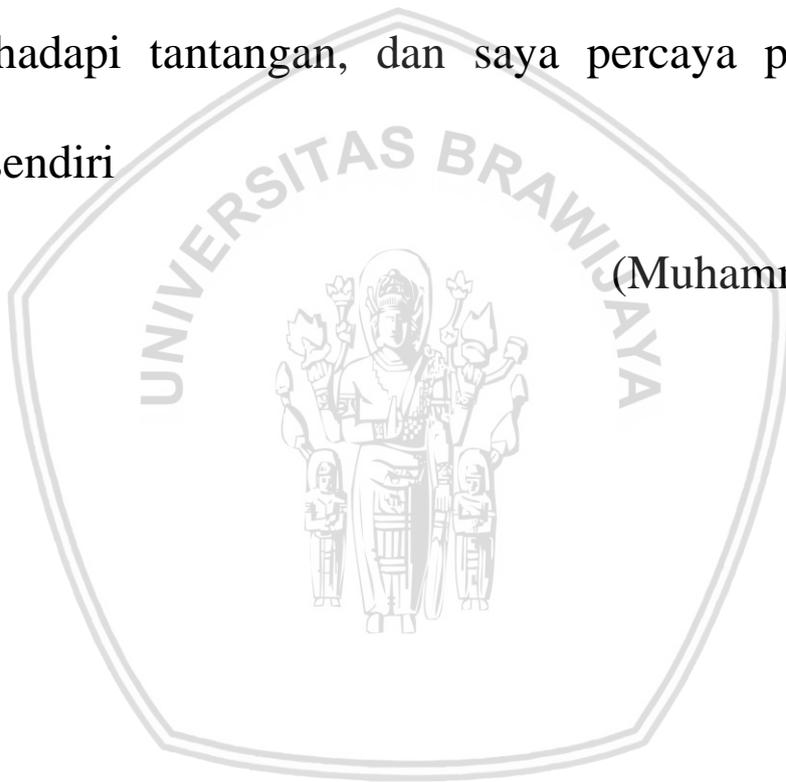
United Nations Environment Programme. 1992. Rio Declaration on Environment and Development. <http://www.unep.org>.



MOTTO

Ti adanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri

(Muhammad Ali)





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Univesitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 02 Juni 2016

Jam : 09.00 - 10.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Rizki Ananda

Judul : Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan

Berkelanjutan di Sektor Perikanan

Dan dinyatakan lulus.

Majelis Penguji

Ketua

Anggota

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota

Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP
NIP. 201107851214 1 001



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perikanan (Studi pada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo)

Disusun oleh : Rizki Ananda

NIM : 0910310299

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

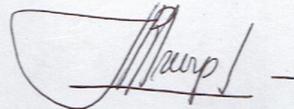
Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, 2 Mei 2016

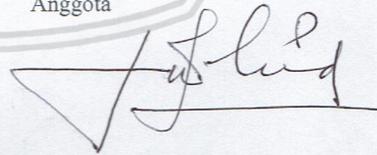
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si
NIP. 19530807 197903 2 001



Drs. Abdul Wachid, M. AP.
NIP. 19561209 198703 1 008

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 9 Mei 2016



RINGKASAN

Rizki Ananda, 2016, **Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perikanan (Studi pada Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo)**, Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP

Penelitian ini dilakukan karena Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Kota Probolinggo menjadi salah satu pelabuhan perikanan pantai terbesar di pesisir utara Pulau Jawa bagian timur dengan sumber daya perikanan yang sangat potensial. Pelabuhan ini terus berusaha untuk berkembang tidak hanya sebagai lokasi pendaratan ikan, melainkan menjadi pusat investasi di bidang perikanan serta wisata edukasi, hal ini didasarkan pada kondisi alam dan letak geografis yang sangat mendukung. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai dan layak digunakan akan mempengaruhi kegiatan produksi perikanan di wilayah laut dan darat dalam bongkar muat hasil tangkapan ikan. Agar kegiatan-kegiatan operasional pelabuhan perikanan dapat berkembang dengan baik, maka dibutuhkan adanya peran serta pemerintah provinsi untuk pengembangan pelabuhan perikanan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan asset pelabuhan dan memperlancar kegiatan perikanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta faktor yang menjadi penghambat peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo. Sumber data diperoleh dari informan yang merupakan pegawai UPT di wilayah Probolinggo, berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi dari berbagai sumber. Analisis data didasarkan pada analisis interaktif oleh Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah berperan memberikan berbagai fasilitas pelabuhan, pengendalian dan pengawasan pelabuhan guna ketertiban berlayar serta terjaganya ekosistem perikanan. Dalam pengembangannya Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan terdapat faktor penghambat salah satunya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang bertugas merawat dan menjaga bangunan tersebut, kurangnya kepedulian pengguna jasa terhadap pelabuhan perikanan. Rekomendasi yang paling utama agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dapat menjalin komunikasi secara efektif dengan instansi yang terkait untuk mengoptimalkan operasional pelabuhan perikanan serta lebih intensif memberikan himbauan tentang aturan pelabuhan perikanan terhadap pengguna jasa pelabuhan perikanan.

Kata Kunci : peran pemerintah, pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan

SUMMARY

Ananda, 2016, **Role of Government in Achieving Sustainable Development of Fisheries Sector(Study on Development of Coastal Fishery Port Mayangan in Probolinggo)**, Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP

This research was conducted as Mayangan Coastal Fishing Port in the town of Probolinggo become one of the largest coastal fishing port on the north coast of eastern Java with fisheries resources potential. This port is constantly striving to develop not just as a fish landing site, but rather a center of investment in the field of fisheries and tourism education, it's based on natural conditions and geographic location are very supportive. Provision of facilities and infrastructure of the fishing port of adequate and fit for use will affect fisheries production activities in the area of land and sea in the loading and unloading of fish catches. In order for the operational activities of fishing ports thrive, we need the participation of the provincial government for the development of fishing ports on an ongoing basis so as to improve the port assets and facilitate the activities of these fisheries. This study aims to describe and analyze as well as factors that constrain the government's role in realizing sustainable development.

This research uses descriptive qualitative approach. The research was done at the Port Fishery Mayangan Beach in Probolinggo. Sources of data obtained from informants merupakan UPT employees in the area of Probolinggo, in the form of interviews, observation, and documentation from various sources. The data analysis was based on an interactive analysis by Miles and Hubberman.

The results of this study concluded that the government has a role providing various port facilities, control and supervision of the port to sail order and in the maintenance of fisheries ecosystems. In its development Mayangan Coastal Fishery Port are inhibiting factors one of which is the lack of human resources in charge of tending and maintaining the building, the lack of concern for service users to the fishing port. The most important recommendation that the Department of Marine and Fisheries, East Java Province through the Technical Implementation Unit Mayangan Coastal Fishing Port can communicate effectively with agencies to optimize operational as well as more intensive fishing ports provide an appeal about the rules of fishing ports fishing ports to service users.

Keywords: the role of government, sustainable development, fisheries sector

KATA PENGANTAR

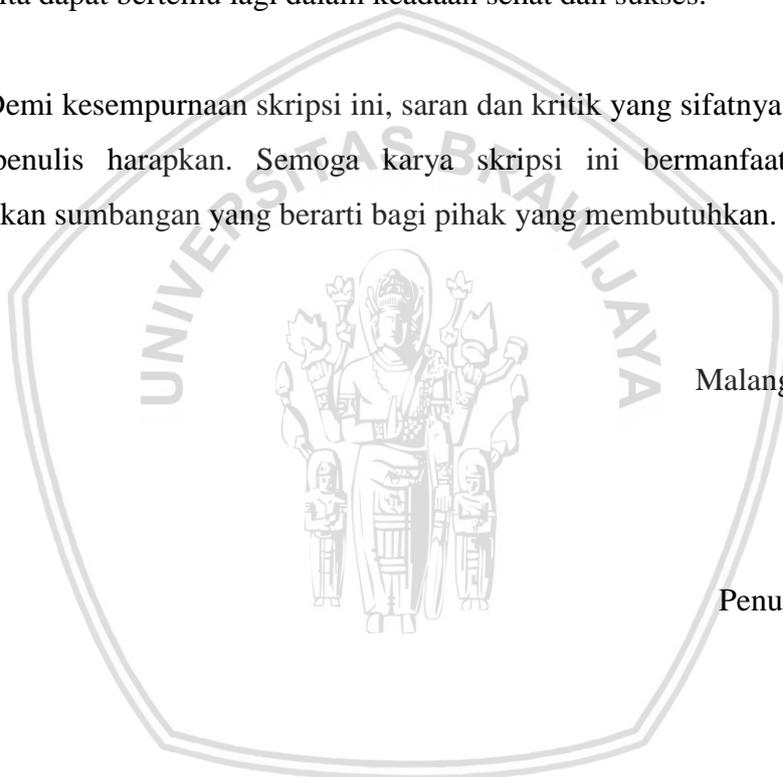
Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perikanan (Studi pada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo).” Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi.

Atas tersusunnya skripsi ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan tulus ikhlas. Pada kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr.Lely Indah Mindarti, M.Si selaku ketua Prodi Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si dan Drs. Abdul Wachid, M.APselakuDosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Adminstrasi terutama dosen jurusan Administrasi Publik atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
6. Kepada Bapak Siwanto seksi sarana prasarana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Bapak Nonot Widjayantodari Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan selaku narasumber obyek penelitian atas waktu dan kemudahan yang diberikan dalam melakukan penelitian dan wawancara.

7. Kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, dan serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi yang besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat angkatan 2009 kelas G, teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi terutama Jurusan Administrasi Publik angkatan 2009 yang selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini serta masih banyak lainnya yang selalu menemani dalam menjalani kuliah di Malang selama ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat dan sukses.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, 2 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
RINGKASAN	iii
<i>SUMMARY</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB I IKAJIAN PUSTAKA	10
A. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	18
C. Peran Pemerintah Daerah	22
D. Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)	30
E. Pelabuhan Perikanan	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Fokus Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Instrumen Penelitian	53
G. Analisis Data	53



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Kota Probolinggo	58
2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo	61
B. Penyajian data	74
1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo.	74
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo	99
C. Pembahasan	109
1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo.	109
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo	115
 BAB V PENUTUP.....	 120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121
 DAFTAR PUSTAKA	 123



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan	78
Tabel 2. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.....	83
Tabel 3. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan	89
Tabel 4. Data Armada Kapal Perikanan beserta Alat Tangkap yang digunakan PPP Mayangan- Kota Probolinggo Tahun 2013	94
Tabel 5. Perbandingan Jumlah Armada Kapal Perikanan PPP Mayangan – kota Probolinggo Tahun 2011-2013	95
Tabel 6. Perbandingan Jumlah Alat Tangkap Ikan PPP Mayangan – kota Probolinggo Tahun 2011-2013	95
Tabel 7. Perbandingan Jumlah Hasil Produksi Tangkapan Ikan.....	96
Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	55
Gambar 2. Skema Kerja di UPPPP Mayangan Kota Probolinggo.....	73
Gambar 3. Interview dengan Bpk Nonot Wijayanto selaku kepala Pelabuhan & Syahbandar.....	76
Gambar4. Breakwater barat	79
Gambar 5. Dermaga (<i>sheet pile</i>)	80
Gambar 6. Jalan Pelabuhan	81
Gambar 7. Kolam Pelabuhan Mayangan	82
Gambar 8 Kantor Administrasi pelabuhan.....	84
Gambar 9. SPBU untuk kapal ikan	86
Gambar 10. IPAL PPP Mayangan	87
Gambar 11. Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Mayangan	87
Gambar 12. Musholla.....	90
Gambar13. Gedung pertemuan	91
Gambar 14 Saluran irigasi pelabuhan	101
Gambar15.pos pengawasan pelabuhan	101
Gambar16. Kantor unit kredit rakyat	102
Gambar17 tempat parkir pelabuhan	102
Gambar18 kolam labuh pelabuhan.....	104
Gambar 19. Area penyimpanan jaring	103

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Melaksanakan Survey / Penelitian
2. LAKIP Dinas Kelautann dan Perikanan 2014
3. *Master Plan* Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan

